

**PENGARUH KOMPETENSI, TRANSPARANSI, DAN PEMAHAMAN
PERATURAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Banyudono dan
Kecamatan Nogosari)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh:

ARIZKA DWI NUGRAHENI
NIM 18.52.2.1.061

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PENGARUH KOMPETENSI, TRANSPARANSI, DAN PEMAHAMAN
PERATURAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Banyudono dan
Kecamatan Nogosari)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah**

Oleh:

ARIZKA DWI NUGRAHENI
NIM 18.52.2.1.061

Surakarta, 11 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.L., M.Si.
NIP. 19841008 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum W. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ARIZKA DWI NUGRAHENI
NIM : 18.52.2.1.061
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI, TRANSPARANSI, DAN PEMAHAMAN PERATURAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari)”**

Adalah benar tidak pernah dilakukan penelitian ataupun sebagai plagiasi dari karya pihak lain. Jika suatu saat didapatkan bahwa tugas akhir ini sebagai plagiat, penulis siap mendapatkan sanksi berdasarkan pada kebijakan yang diberlakukan. Demikian pembuatan surat ini dengan sebenarnya digunakan dengan sebaik mungkin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 202



Arizka Dwi Nugraheni

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum W. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ARIZKA DWI NUGRAHENI
NIM : 18.52.2.1.061
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian saya yang berjudul berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI, TRANSPARANSI, DAN PEMAHAMAN PERATURAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari)”**

Dengan ini penulis mengakui dengan sebenarnya sudah menjalankan penelitian serta mengambil data di Kantor Kelurahan Desa Se-Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari. Jika suatu saat nanti diperoleh tugas akhir ini memanfaatkan data yang tidak relevan pada data sesungguhnya, penulis siap mendapatkan sanksi berdasarkan pada kebijakan yang diberlakukan.

Demikian pembuatan surat ini dengan sebenarnya digunakan dengan sebaik mungkin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 202



Arizka Dwi Nugraheni

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Arizka Dwi Nugraheni

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami informasikan sesudah menelusuri dan memperbaiki sebutuhkan, kami memutuskan skripsi saudara Arizka Dwi Nugraheni, NIM 18.52.2.1.061 yang berjudul:

PENGARUH KOMPETENSI, TRANSPARANSI, DAN PEMAHAMAN PERATURAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari)

Telah bisa diberikan munaqosah untuk dijadikan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Maka dari itu, kami memohon guna tugas akhir ini segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum W.Wb.

Surakarta, 11 April 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
NIP. 19841008 201403 2 005

PENGESAHAN

**PENGARUH KOMPETENSI, TRANSPARANSI, DAN PEMAHAMAN
PERATURAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan
Nogosari)**

Oleh:

ARIZKA DWI NUGRAHANI
NIM.18.52.21.061

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 M / 13 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Frank Aligarh, S. Pd., M. Sc.
NIP. 19920912 201903 1 011



Penguji II
Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si. Ak.
NIP. 19740302 200003 2 003




Penguji III
Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP
NIP. 19800712 201403 1 003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS Ar-Ra'd 11)

Hasil bisa saja mengkhianati usaha. Tetapi yang tidak berusaha tidak akan berhasil. Tetap Semangat untuk berusaha biarpun tidak tahu kapan kita berhasil.
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk :

- Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat, hidayat, serta kesehatan hingga mampu menuntaskan karya ini.
- Untuk kedua orangtuaku tercinta dan tersayang, Bapak Wahyudi dan Ibu Supani yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku, kelancaran segala urusanku, serta mendukungku secara penuh dan telah membesarkannku dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga bisa sampai sejauh ini.
- Untuk kakak-kakaku dan juga keponakan tersayang, Wahyu Fitri Istivana, Mulat Sutrisno, Joko Suwito dan Djuwarini yang selalu pengertian terhadap segala urusanku dan membantu jalannya proses penuisan skripsi ini.
- Bestie-bestie tersayang dan tercinta Alviranda Yola, Rini Fitri Fidiyanti, Zulan Ilmada, Linda, suci dan Teman-teman Pesona 09 dan tidak lupa seseorang yang selalu ada untuk saya Andrea Brealy Saputra yang selalu mendukung dan menemaniku selama berjalannya pengerjaan skripsi dari yang mengurus surat perizinan penelitian sampai dengan pengumpulan data penelitian. Dan akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan peran bantuan dan dorongan kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menuntaskan penelitian jenjang strata satu (S1) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Transparansi, Dan Pemahaman Peraturan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Banyudono dan Seluruh Desa Kecamatan Nogosari)” Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said dengan baik dan lancar.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah turut andil dalam bimbingan, memberi saran dan dukungan sehingga Usulan Penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Khairul Imam, S.HI., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Fitri Laela Wijayati, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Anim Rahmawati, S.E.I., M.S.i, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberiku banyak pengarahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Raden Mas Said yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

7. Kantor Kecamatan Banyudono & Kecamatan Nogosari & Seluruh perangkat desa se-Kecamatan Banyudono & se-Kecamatan Nogosari, yang sudah berkenan untuk memberi izin penelitian dan ketersediannya menjadi responden dalam penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu, Bapak Wahyudi dan Ibu Supani serta keluarga terimakasih atas doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada habisnya.
9. Teman-Temanku (Rini Fitri F, Alviranda Yola, Sonia, Dan Fajar) & teman-teman sekelasku (AKS B & AKS profesional C) angkatan 2018, dan berbagai pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan secara menyeluruh yang sudah memberi semangat dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis sadar dengan penuh penelitian ini tidak dapat dinyatakan sempurna, baik dari segi substansi maupun diksi yang digunakan, sehingga penulis menerima kritikan maupun saran yang membangun. Akhir kata penulis mengharapkan adanya kegunaan dari penelitian ini & menjadi referensi pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 11 April 2023

Penulis

ABSTRACT

This research aims to analyze affect the influence of competence, transparency, and understanding of financial regulations the accountability of managing village funds in all villages in Banyudono District and Nogosari District, Boyolali Regency,.

In this study, the authors used quantitative research methods. The target population that will be used as respondents are 28 villages in the Banyudono District and Nogosari District, consisting of 140 people, and the data that can be used in the study are 115 respondents. For sampling in this study researchers used a purposive sampling technique. The use of data collection in this study is primary data, namely by distributing questions in the form of questionnaires directly to respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS application

The results obtained in this study are that the competency variable positively affects village fund management accountability and the variable understanding of financial regulations positively affects village fund management accountability and variable transparency positively affects village fund management accountability.

Keywords: *Competence, Transparency, Understanding of Financial Regulations, Accountability of Village Fund Management.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Kompetensi, Transparansi, Dan Pemahaman Peraturan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali).

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kuantitatif. Populasi sasaran yang akan dijadikan sebagai responden adalah 28 desa di Kecamatan Banyudono Dan Kecamatan Nogosari, yang terdiri dari 140 orang, dan Data yang dapat digunakan dalam penelitian adalah 115 responden. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer, yaitu dengan cara menyebarkan pertanyaan berupa kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik analisa data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan pemahaman peraturan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kunci : Kompetensi, Transparansi, Pemahaman Peraturan Keuangan, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.7 Jadwal Penelitian	11
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Teori	13
2.1.1 Teori Atribusi	13
2.1.2 Akuntabilitas	15
2.1.3 Dana Desa.....	16
2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	17
2.1.5 Kompetensi Aparatur Desa.....	20
2.1.6 Transparansi	22
2.1.7 Pemahaman Peraturan Keuangan	23

2.2 Hasil Penelitian yang relevan	26
2.3 Kerangka Berfikir	31
2.4 Hipotesis	32
2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	32
2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	33
2.4.3 Pengaruh Pemahaman Peraturan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel	38
3.3.1 Populasi	38
3.3.2 Sampel	38
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	44
3.4 Data dan Sumber Data	45
3.4.1 Data	45
3.4.2 Sumber Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Variabel Penelitian.....	46
3.6.1 Variabel Dependen	47
3.6.2 Variabel Independen.....	47
3.7 Definisi Operasional Variabel	47
3.8 Teknik Analisis Data	48
3.8.1 Uji Instrumen Penelitian	49
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.8.3 Uji Ketepatan Model.....	51
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda	52
3.8.5 Uji Hipotesis (Uji t)	53
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Penelitian	54

4.1.1	Proses Penelitian	54
4.2	Proses Deskripsi Karakter Responden	56
4.3	Analisis Deskriptif Jawaban Responden	60
4.4	Pengujian Dan Hasil Analisis Data	64
4.4.1	Uji Instrumen Data.....	64
4.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	69
4.5	Uji Ketetapan Model	72
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
4.7	Uji Hipotesis (Uji Statistik t).....	75
4.8	Pembahasan Penelitian	77
BAB V PENUTUP.....		81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Keterbatasan Penelitian	81
5.3	Saran Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN.....		87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Yang Relevan.....	27
Tabel 2. 2 Kerangka Berfikir	31
Tabel 3. 1 Sampel Penelitian.....	39
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	47
Tabel 3. 3 Skala Likert	49
Tabel 4. 1 Tingkat Pengembalian Responden.....	56
Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden.....	57
Tabel 4. 3 Data Responden Berdasarkan Jabatan Responden.....	58
Tabel 4. 4 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel 4. 5 Data Responden Berdasarkan Usia Responden	59
Tabel 4. 6 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	60
Tabel 4. 7 Penilaian Analisis Deskriptif	61
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Kompetensi	61
Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Transparansi.....	62
Tabel 4. 10 Deskripsi Variabel Pemahaman Peraturan Keuangan	63
Tabel 4. 11 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	64
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).....	65
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validasi Kompetensi (X1).....	66
Tabel 4. 14 Hasil Uji Validasi Transparansi (X2).....	67
Tabel 4. 15 Hasil Uji Validasi Transparansi (X3).....	68
Tabel 4. 16 Hasil Uji Reliabilitas	69

Tabel 4. 17 Hasil Uji Normalitas	70
Tabel 4. 18 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	71
Tabel 4. 19 Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
Tabel 4. 20 Hasil Uji Statistik F.....	72
Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi	73
Tabel 4. 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi	74
Tabel 4. 23 Hasil Uji Statistik t.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 jadwal penelitian.....	87
Lampiran. 2 Surat Izin Penelitian.....	88
Lampiran. 3 Kuisisioner Penelitian	90
Lampiran. 4 hasil wawancara.....	97
Lampiran. 5 Hasil Uji Deskripsi Variabel.....	99
Lampiran. 6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	100
Lampiran. 7 hasil uji asumsi klasik.....	106
Lampiran. 8 Hasil Uji Ketepatan Model	107
Lampiran. 9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	108
Lampiran. 10 Hasil Uji t.....	108
Lampiran. 11 tabel R.....	109
Lampiran. 12 Tabel ditribusi T	110
Lampiran. 13 Tabulasi Data Penelitian (Karakteristik Responden).....	111
Lampiran. 14 Hasil dari Jawaban Responden	116
Lampiran. 15 Dokumentasi Kegiatan Penelitian	129
Lampiran. 16 Daftar Riwayat Hidup.....	133
Lampiran. 17 Hasil Cek Plagiasi.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai hukum batasan kawasan dan memiliki wewenang dalam mengurus serta mengatur urusan kebutuhan pemerintahan, masyarakat sekitar daerah atas dasar prakarsa, dasar pengusulan, ataupun wewenang tradisional yang sah dan dihargai untuk sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia (Mualifu et al., 2019).

Desa dalam mengelola potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajibannya harus dituntut agar akuntabel dan transparan. Mengingat meningkatnya besarnya jumlah dana desa yang diberikan dari pemerintahan yang tentu memerlukan tata kelola secara baik. Dengan demikian, tidak akan munculnya potensi penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aparatur untuk membantu kepala desa untuk pengelolaan dana desa (Khiyamah, 2018).

Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan transparan, akuntabel, partisipasif dan dilaksanakan secara baik dan sesuai anggarannya. Tahapan tata kelola dana desa diharuskan atas dasar dasar keterbukaan, tanggung jawab, dan kontributif. Untuk mengelola dana tersebut diminta terdapat sebuah bagian pengelolaan pemerintah yang baik seperti dengan adanya akuntabilitas (Kurnia et al., 2019).

Menurut Mardiasmo, (2009) dalam Khimayah, (2018) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban atas tata kelola sumber daya dan penerapan peraturan yang ditugaskan pada kepentingan pelapor untuk memperoleh target yang ditentukan dengan teratur.

Akuntabilitas merupakan keharusan bagian pemilik kepercayaan atau *agent* dalam memberi suatu bentuk tanggung jawab, penyajian, pelaporan, dan menjelaskan seluruh kegiatan dan tindakan sebagai bentuk entitas pada pihak yang memberikan kepercayaan mempunyai kewajiban dalam mengambil sikap entitas itu sendiri (Khimayah, 2018).

Dalam penyusunan akuntabilitas pengelolaan dana desa tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya, kompetensi aparatur desa, transparansi, dan pemahaman peraturan keuangan. Kompetensi aparatur desa merupakan suatu karakter dan sifat yang menjadi dasar setiap orang didalam hasil kerja yang efektif bagi individu atau kemampuan wawasan serta sikap yang dimiliki aparatur desa berdasarkan bagaimana mereka menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa (Fajri & Julita, 2021).

Hubungan antara kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah apabila semakin baik wawasan kemampuan aparatur desa akan mendorong proses bekerja dengan efektif, efisien dan semakin tinggi pula tingkat kecepatan dan ketepatan kinerja aparatur desa tersebut, sehingga pengelolaan dana desa akan menjadi semakin akuntabel. Namun, kompetensi aparatur desa dapat terbilang rendah jika alokasi dana desa (ADD) yang terbilang

cukup besar. Sehingga, timbulnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh wawasan aparatur desa didalam tata cara pengalokasian dana desa (Fajri & Julita, 2021).

Tranparansi adalah sikap terbuka pemerintahan untuk memberi informasi yang berhubungan pada kegiatan tata kelola sumber daya masyarakat pada beberapa pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public (Aprilya & Fitria, 2020). Pembangunan transparansi berdasarkan pada informasi yang luas, semua tahapan pemerintahan, kelembagaan dan informasi buuh dilakukan akses dari berbagai pihak yang membutuhkan, serta ketersediaan informasi diharuskan relevan guna mampu dipahami dan ditinjau.

Hubungan antara transparansi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pada dasarnya transparansi yang ditunjukkan dalam bentuk pengelolaan keuangan yang tertuang dalam anggaran, dilihat semakin tinggi maka akan memberi pengaruh pada pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. semakin transparan aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana yang berasal dari publik dan untuk publik, maka akan tercapainya pencapaian akuntabilitasnya. tanpa adanya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah lebih rentan terhadap korupsi dan lemah dalam hal akuntabilitas (Setiana, D. N., & Yuliani, 2017).

Pemahaman adalah sebuah langkah setiap orang sehingga dapat melihat suatu hal, jadi pemahaman aparat desa terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan tata cara pengelolaan keuangan anggaran desa atau dana desa

(Fajri & Julita, 2021). Hubungan antara pemahaman peraturan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pemahaman aparat desa terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan keuangan desa.

Sehingga pemahaman tentang pengaturan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa agar dapat menghasilkan keuangan yang baik. Namun, jika aparatur desa tidak berhasil untuk mengerti peraturan keuangan, sehingga dapat berpengaruh terhadap penyimpangan pelaporan finansial yang dibuat dan tidak sesuai terhadap kriteria yang ditentukan pemerintahan, jadi memberi pengaruh pengambilan keputusan dan tidak menggambarkan tata kelola yang terbuka (Hartikayanti & Jayanti, 2020).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah penelitian Hartikayanti & Jayanti, (2020) yang menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya pada variabel Responsivitas, transparansi, motivasi, pemahaman perstutran keuangan, dan keadilan memberi pengaruh pada akuntabilitas tata kelola dana desa, sedangkan lainnya tidak memberi pengaruh apapun.

Pada Penelitian yang dilaksanakan dari Luthfiani et al., (2020) menerangkan bahwa hasil penelitiannya pada variabel kompetensi aparatur desa perangkat desa dan partisipasi masyarakat tidak memberi pengaruh pada akuntabilitas tata kelola dana desa, sementara aplikasi siskeudes dan keataan pajak bendahara desa memberi pengaruh baik terhadap akuntabel tata kelola dana desa.

Aprilya & Fitria, (2020) menampilkan hasil penelitiannya pada variabel kompetensi aparatur desa aparatur serta tanggungjawab kelompok memberi

pengaruh baik pada akuntabel tata kelola dana desa, sementara keterukaan dan partisipasi publik tidak memberi pengaruh pada akuntabel tata kelola dana desa. Penelitian yang di jalan Aziiz (2019) menyatakan bahwa hasil penelitiannya pada variabel kompetensi aparatur desa aparatur desa, pemanfaatan teknologi, dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mualifu et al., (2019) telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dan desa. Hasil penelitiannya menampilkan variabel transparansi, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Gayatri, (2019) menyatakan bahwa hasil penelitiannya pada variabel Kompetensi aparatur desa pemerintahan desa, sikap pemimpin desa, dan ikut serta publik berpengaruh baik terhadap akuntabilitas tata kelola dana desa.

Hendratmi et al., (2017) menampilkan hasil penelitiannya pada variabel transparansi dan komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hasil pada ada penelitian Setiana, D. N., & Yuliani, (2017) menampilkan variabel peran aparatur desa pemerintahan desa, sikap pemimpin desa, dan ikut serta publik berpengaruh baik terhadap akuntabilitas tata kelola dana desa.

Purba, (2020) telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dan desa. Hasil penelitiannya menampilkan variabel peran perangkat desa berpengaruh nyata pada akuntabel tata kelola dana desa, sementara pengetahuan aparatur desa tidak berpengaruh nyata pada akuntabel tata kelola dana desa. Dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani, (2020)

menampilkan variabel Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Tetapi Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Didalam pelaksanaan akuntabilitas pengalokasian dana desa di Kecamatan Banyudono masih adanya berbagai masalah seperti yaitu proses penyerapan anggaran dana desa di wilayah Kecamatan Banyudono. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Budi Arif sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Banyudono menyebutkan bahwa adanya contoh kasus di Kecamatan Banyudono terdapat desa yang masih tertinggal dalam proses penyerapan dana desa. Target penyerapan dana desa tahap I yang melampaui batas sehingga berdampak pada penyerapan dana desa tahap II selanjutnya ikut mengalami keterlambatan sehingga ketertinggalan tersebut dapat memperlama perolehan akuntabel tata kelola dana desa di beberapa desa tersebut.

Terdapat permasalahan keterbukaan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kecamatan Nogosari, terdapat desa yang belum sepenuhnya melaksanakan transparansi realisasi pengelolaan dana desa, partisipasi pengawasan pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti Kerua RT atau RW tidak terlibat dalam Tim Pelaksana Kegiatan dan tidak terlibat dalam musrenbangdes.

Pada penelitian ini penulis mengkaji di daerah Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dikarenakan di wilayah tersebut terdapat banyak potensi sumber daya seperti perairan, perternakan, pertanian, serta

pariwisata. Selain itu realisasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari yang terbilang Sangat Besar yakni di Kecamatan Banyudono sebesar 10.179.419.681 dan di Kecamatan Nogosari Sebesar 10.933.560.636.

Berdasarkan Surat Keterangan Bupati Boyolali Terdapat permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Boyolali yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa belum sesuai dengan PMK nomor 190 tahun 2021. Terdapat desa yang Rencana Kerja Pemerintah Desa belum sesuai dengan PMK nomor 190 tahun 2021. Terdapat desa yang tidak melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan PMK nomor 190 tahun 2021. dan Pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes belum sesuai dengan yang seharusnya.

Pengelolaan dana desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes dilakukan oleh tenaga operator, ada yang dibiayai oleh PBH, PAD, dan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa, operator menguasai akun kaur keuangan dan sekretaris desa. Selain itu sekretaris desa sepenuhnya belum memahami pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes. Kondisi tersebut disebabkan karena keterbatasan SDM dan belum optimalnya pembinaan dan pelatihan / sosialisasi penggunaan aplikasi keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes yang tidak pada pemilik akun atau sesuai jabatan dan wewenangnya, berpotensi terjadinya penyalahgunaan akun.

Terdapat perbedaan penafsiran di pemerintahan desa terkait syarat pencairan dana desa, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Akibatnya prosedur pencairan dana APBdes di wilayah Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 63 ayat 4 tentang pelaksanaan pencairan dana bersumber dari APBDes.

Penelitian ini merupakan replikasi dari jurnal internasional yang dilakukan oleh Hartikayanti & Jayanti, (2020) dengan judul *Internal Factors Affecting the Accountability of Village Fund Governance: Evidence from Indonesia*.

Selain itu, penelitian yang ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Peneliti Peneliti P. P. Dewi et al., (2021), Puspa & Prasetyo, (2020), Aziiz, (2019), Masruhin & Kaukab, (2019), dan Mualifu et al., (2019) menampilkan kompetensi aparatur desa aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Berbeda dengan penelitian Luthfiani et al., (2020) menampilkan Kompetensi aparatur desa aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajri & Julita, (2021) Hartikayanti & Jayanti, (2020), Mualifu et al., (2019), Hendratmi et al., (2017) dan Wijayanto et al., (2017) menampilkan variabel transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sari & Andra Asmara, (2021) dan Aprilya & Fitria, (2020) menampilkan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Hartikayanti & Jayanti, (2020) dan (Purba, 2020) dimana menunjukkan hasil dari penelitian yang mereka lakukan pada variabel pemahaman peraturan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kompetensi, Transparansi, Dan Pemahaman Peraturan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa pada Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari masih belum transparan, adanya keterbatasan SDM yang belum optimal.
2. Keterlambatan target penyerapan dana desa yang dilakukan oleh beberapa desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti perlu membatasi hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel kompetensi, transparansi, dan pemahaman peraturan keuangan yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini berfokus dan akan dilakukan pada pemerintahan desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi pusat permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari?
3. Apakah pemahaman peraturan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan keuangan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Akademisi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari peneliti, penelitian ini diinginkan dapat menjadi rujukan referensi dan tambahan literasi terkait dengan penelitian yang sejenis dengan fokus penelitian tentang akuntabilitas tata kelola dana desa.

2. Manfaat Bagi Pemerintahan Desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini diinginkan bisa memberi peran praktis kepada perangkat desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan khususnya untuk mengetahui factor internal yang bisa memberi pengaruh akuntabilitas tata kelola dana desa sehingga dana anggaran bisa dipertanggungjawabkan dan meminimalisir terjadinya laporan keuangan yang tidak dapat di peranggungjawabkan.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk ketepatan dan kejelasan arah mengenai pembahasan dalam penelitian ini maka sistematika yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian, dimana pada bagian ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan batas-batas permasalahan, rumusan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan uraian dari teori yang mendasari dan penjelasan variabel, penelitian sebelumnya, kerangka berfikir, serta hipotesa riset yang diterapkan hingga memudahkan analisa pada penelitian yang dijalankan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai waktu dan daerah riset, jenis dan populasi penelitian, sampel dan metode mengambil sampel, data dan sumber, metode untuk mengumpulkan data, variable riset, penjelasan operasional, dan teknik analisa data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai diskripsi objek penelitian dan analisis untuk kemudian hasilnya dapat disimpulkan dan menjadi saran serta masukan.

BAB V Penutup

Bab ini yaitu bagian akhir penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran/kritik yang akan diberikan pembaca kepada instansi pemerintah desa yang terkait dan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini pertama kali di cetuskan oleh Fritz Heider, teori ini menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, dengan kata lain dapat mengetahui sikap atau karakteristik orang tersebut dan kita dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dengan hanya melihat perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individu (Karnia & Haryanto, 2015).

Ketika perilaku tersebut berada dibawah kendali diri sendiri, maka perilaku tersebut berawal dari kemauan dirinya sendiri yang dimaksud dengan faktor internal. Sedangkan perilaku individu yang dilakukan karena adanya paksaan dari lingkungan atau kondisi tertentu yang mengakibatkan individu tersebut melakukan perilaku itu, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar atau eksternal (Karnia & Haryanto, 2015). Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang.

Teori atribusi ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Martinko et al., 2011).

Teori atribusi ini relevan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, (Martinko et al., 2011) berpendapat bahwa teori atribusi melibatkan karakteristik internal maupun eksternal individu. Karakter inilah yang akan mempengaruhi kualitas kerja dari individu. Karakteristik yang dimiliki seorang aparatur desa merupakan salah satu penentu terhadap kecurangan yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, selain itu perasaan yang dialami seseorang mampu secara personal mempengaruhi kinerjanya serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian dan usaha yang dimiliki (Susandya et al., 2022).

Teori atribusi pada proses penganggaran, bisa mengetahui sikap seseorang saat seseorang itu ikut serta dalam proses penganggaran, apakah seseorang akan menciptakan perilaku yang cenderung positif atau negatif. Terdapat beberapa asumsi terkait teori atribusi seperti (Kriyantono 2014:17) :

1. Individu akan mencari tahu penyebab perilaku yang dilihatnya.
2. Dalam menjelaskan perilaku, individu akan menggunakan proses sistematis.
3. Ketika atribusi tersebut sudah dibuat, maka perilaku tersebut dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku selanjutnya.
4. Terdapat alasan mengenai pandangan individu kepada orang lain.

Dalam membangun kesan ada 3 tahapan yakni : mengamati perilaku, memastikan perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, mengklarifikasi perilaku sebagai dorongan motivasi internal dan eksternal .

2.1.2 Akuntabilitas

Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam Mualifu et al., (2019) akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawaban atau mampu menanggapi dan menjelaskan secara efektif hasil kerja dan sikap setiap pemimpin disebuah kelompok pada semua pihak yang mempunyai wewenang ataupun kewajiban mendapatkan tanggung jawab.

Akuntabilitas bisa dicapai dengan memberi jalan pada pihak yang membutuhkan, mengajukan pertanyaan serta meminta komitmen dari mengambil keputusan dan penyelenggara pada tingkat program, wilayah dan publik. Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD merupakan upaya untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memegang erat kemauan masyarakat serta berbagai nilai yang bisa menambah tingkat kapasitas masyarakat untuk mencapai target sikap mandiri, pembangunan dan keadilan sosial yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (Kurnia et al., 2019).

Menurut Mardiasmo (2002:105) dalam (Temalagi & Anakotta, 2021) mengatakan akuntabilitas adalah prinsip tanggung jawab masyarakat yang artinya tahapan anggaran yang berawal dengan pembuatan rencana, susunan, dan penyelenggaraan wajib dibuat laporan dan tanggung jawab pada DPRD serta publik yang tidak sebatas mempunyai wewenang dalam melihat anggaran namun masyarakat juga memiliki hak dalam meminta tanggung jawab terhadap perencanaan atau penyelenggaraan anggaran.

2.1.3 Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan Dana Desa menyebutkan bahwa dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan untuk Desa yang dikirim dari APBD daerah dan dimanfaatkan dalam memberikan biaya penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan pembangunan, pembimbingan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memberi anggaran Dana Desa secara nasional dalam APBN tiap tahun. Dana Desa berasal dari belanja pemerintahan dengan membuat rencana kegiatan yang efisien dan berkeadilan (Temalagi & Anakotta, 2021).

Menurut Indrawati (2017) dalam Kurnia et al., (2019) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN). Pemahaman mengenai tata kelola dana desa di desa sebagai komponen dan dasar yang ada dari pemilik kepentingan pada tingkat pemerintahan desa, terkhusus perangkat desa, untuk mewujudkan keterbukaan dan entitas finansial desa.

Akuntabilitas bisa ditinjau dengan cara pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa khususnya pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan

untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (Kurnia et al., 2019).

a. Asas-asas pengelolaan dana desa

Dalam mendukung terselenggaranya good governance dalam pemerintahan desa, tata kelola desa harus dijalankan berdasarkan pada berbagai asam tata kelola finansial desa. Beberapa asas tersebut yaitu dengan berikut (Purba, 2020) :

1. Transparan, merupakan prinsip terbuka yang memberikan kemungkinan rakyat mengerti dan memiliki akses informasi dengan luas mengenai finansial desa.
2. Akuntabel, merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan dalam tata kelola dan pengontrolan sumber daya dan penyelenggaraan aturan yang diyakini sebagai bentuk mencapai target yang sudah ditentukan.

b. Tujuan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan tujuan Dana Desa yaitu untuk menambah tingkat layanan masyarakat desa, menurangi kemiskinan, melakukan pengembangan ekonomi, meminimalisir pembangunan yang senjang, serta menambah kekuatan publik desa dengan subyek pembangunannya (Kurnia et al., 2019).

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan hasil kerja perangkat pemerintahan desa dimulai dengan penyusunan rencana sampai monitoring aktivitas yang memanfaatkan anggaran harus mampu dipertanggung jawabkan secara benar, dimana pemerintahan desa harus mempertanggungjawabkan dan memberi laporan masing-masing penyelenggaraan aktivitas dengan tertib pada

publik dan juga pada jajaran pemerintah di atasnya sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang. Akuntabilitas diinginkan bisa menambah tingkat mutu dan juga hasil kerja pemerintah yang terbuka dan dengan orientasi terhadap kebutuhan masyarakat (Fajri & Julita, 2021).

Dari hadirnya akuntabilitas tata kelola dana desa dapat menambah tingkat hasil kerja pemerintahan desa dan memberi bukti pada publik bahwasanya pemerintahan desa sudah melakukan aktivitas berdasarkan pada tujuannya. Selain itu juga secara baik adalah jawaban terhadap keyakinan publik dan bisa mengurangi adanya kecurangan (Sari & Andra Asmara, 2021).

Tingkat akuntabilitas dana desa memberikan wadah bagi masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam pelaksanaan pengawasan, pembangunan, sehingga proses pembangunan berpotensi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Akuntabilitas yang tepat bisa tercapai jika informasi yang diberi dapat dimengerti dengan mudah. Masyarakat dijadikan pihak yang memberikan keyakinan pada pemerintahan dalam mengontrol finansial public, dan memiliki hak dalam memperoleh informasi finansial pemerintahan dalam mengevaluasi instansi (Aprilya & Fitria, 2020).

Adapun indikator akuntabilitas sesuai Permendagri No.113 tahun 2014 adalah sebagai berikut (Purba, 2020):

1. Tahap perencanaan
 - a. Pengurusan tata usaha dijalankan dari bendaharawan desa.

- b. Bendahara desa harus melaksanakan mencatat masing-masing daya terima dan pengeluaran yang dijalankan dan menjalankan penutupan buku di akhir bulan dengan baik.
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa sebagai bentuk penyelenggaraan hak desa dijalankan harus dari rekening kas desa.
 - b. Pengeluaran desa yang menyebabkan beban APBD Desa tidak bisa dijalankan sebelum perancangan kebijakan desa mengenai APBD Desa ditentukan sebagai kebijakan desa.
3. Tahap penatausahaan
 - a. Pengurusan tata usaha dijalankan dari bendaharawan desa.
 - b. Bendahara desa harus melaksanakan mencatat masing-masing daya terima dan pengeluaran yang dijalankan dan menjalankan penutupan buku di akhir bulan dengan baik.
4. Tahap pelaporan
 - a. Kepala Desa harus membuat pelaporan realisasi penyelenggaraan APB Desa pada Walikota atau Bupati berisikan pelaporan semester awal dan akhir tahunan.
 - b. Laporan semester awal berisikan Laporan Realisasi APBDesa.
5. Tahap pertanggungjawaban
 - a. setiap akhir tahun Bupati/Walikota akan mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa dari kepala desa.

- b. Adapun Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.1.5 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi secara umum didefinisikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan, dalam lingkup manajerial sumber daya sebutan kompetensi berpedoman terhadap petunjuk atau karakter setiap orang yang membuat sukses untuk pekerjaannya. Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa yaitu kapasitas tugas di setiap individu yang mencakup komponen wawasan, kemampuan, dan perilaku bekerja berdasarkan pada kriteria yang ditentukan (Mualifu et al., 2019).

Setiap orang memiliki kemampuan aparatur desa yang akan selalu hadir dalam kepribadiannya dan mampu meramalkan perilaku dan kinerja secara luas dalam semua lingkungan kerja dan tugas. atribut (kemampuan), yang dapat dibuktikan melalui penggunaan standar tertentu. (Luthfiani et al., 2020).

Prasyarat mendasar bagi akuntabilitas desa yang efektif adalah kompetensi pengelola dana desa. Output yang baik akan dihasilkan oleh mesin yang kompeten sesuai dengan konsep akuntabilitas. Agar pengelolaan dana desa secara bertahap semakin akuntabel, aparatur desa yang baik akan memperkuat pemahaman dan penerapan aparatur desa terhadap proses pengelolaan dana desa dengan baik.

Jika aparatur desa tidak mengerti hal ini, maka dapat berpengaruh terhadap kesalahan yang dihasilkannya dalam laporan keuangannya dan disparitasnya dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, berdampak pada keputusan yang

dibuat kemudian dan belum mewakili pengelolaan yang akuntabel. Penanganan uang desa diadakan dengan standar akuntabilitas yang lebih tinggi semakin kompeten mesin lokal. Pengelolaan uang desa yang efisien dan tercapainya tujuan pemerintahan akan dimungkinkan oleh aparatur daerah yang kompeten dan berkualitas. (Fajri & Julita, 2021).

Dengan begitu untuk mengelola dana desa bagi tumbuhnya berbagai unsur yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna membangun pembangunan desa secara optimal, maka kompetensi perangkat desa menjadi sangat penting. Menurut Spencer (1993) dalam Masruhin & Kaukab (2019) penetapan standar kompetensi aparatur desa meliputi enam kelompok kompetensi aparatur desa, yaitu:

1. Kemampuan perencanaan dan pelaksanaan (motivasi berorientasi pada tujuan, fokus pada kejelasan tugas, ketelitian, pekerjaan berkualitas tinggi, inisiatif, dan keterampilan mencari dan menggunakan informasi).
2. Kemampuan (empati, fokus pada pelanggan).
3. Kemampuan kepemimpinan (dampak, kesadaran organisasi, dan membangun hubungan).
4. Kemampuan manajemen, yang mencakup kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan mengembangkan orang lain serta bekerja dengan baik dalam tim.
5. Kemampuan intelektual (pemikiran analitis, pemahaman konseptual, dan kemampuan manajerial).

6. Kemampuan kedewasaan (pengendalian diri, kemampuan beradaptasi, dan dedikasi pada organisasi).

2.1.6 Transparansi

Pada Pasal 4 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 tahun 2017, dinyatakan transparan apabila mempunyai prinsip keterbukaan serta data yang pasti dan memberikan kemungkinan publik dalam melihat serta memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang daerah (Mualifu et al., 2019). Transparansi adalah satu dari berbagai prinsip perilaku baik yang didasarkan pada lalu lintas informasi yang terbebas, semua tahapan pemerintah, kelembagaan, dan yang harus bisa didapatkan akses dari pihak yang membutuhkan, serta informasi yang ada cukup dipahami dan ditinjau.

Menurut Mardiasmo (2012) dalam Fajri & Julita (2021), transparansi artinya terbuka dari pemerintahan untuk memberi informasi yang berhubungan pada kegiatan tata kelola sumber daya masyarakat pada berbagai pihak yang memerlukan informasi. Pemerintahan wajib menyediakan informasi finansial serta yang lain dapat diterapkan dari pihak yang membutuhkan untuk membuat keputusan. Standar akuntansi pemerintah menerangkan keterbukaan yaitu memberi informasi finansial yang transparan dan jujur pada publik sesuai pertimbangan publik yang mempunyai wewenang dalam melihat dengan terbuka dan keseluruhan.

Transparansi adalah kebebasan untuk mengakses kegiatan politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam *accountability framework*, faktor individu dan sistem yang

digunakan untuk suatu pemerintah sebagai faktor utama untuk menambah tingkat akuntabilitas (Mualifu et al., 2019).

Dalam menyusun anggaran dapat dikatakan transparansi apabila mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut (Hendratmi et al., 2017) :

- a. Adanya informasi peraturan anggaran.
- b. Adanya berkas anggaran yang dapat diperoleh dengan mudah.
- c. Adanya laporan tanggung jawab sesuai waktunya.
- d. Adanya akomodasi suara atau pengusulan masyarakat.
- e. Adanya sistem memberikan informasi pada masyarakat.

Karena kemampuan pemerintah untuk memantau dan mengawasi dana desa yang dikelola secara efektif, dana yang diterapkan dalam memberdayakan publik bisa diterapkan dengan tepat. Pemerintah desa lebih baik dalam mengalokasikan dana desa ketika ada tingkat transparansi yang lebih tinggi. Akan lebih mudah untuk membentuk pemerintahan yang akuntabel jika pemerintah lebih transparan tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. (Fajri & Julita, 2021).

2.1.7 Pemahaman Peraturan Keuangan

Pemahaman Peraturan Keuangan merupakan pejabat di desa mengetahui aturan, praktik, dan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Aturan yang digariskan dalam peraturan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merinci kegiatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan pemerintah sambil menjabarkan sejumlah teknik pencapaian tujuan (Fajri & Julita, 2021).

Dikarenakan terdapat peraturan mengenai finansial desa yang dimaksudkan guna berperan di seperangkat desa untuk menjalankan peran, mengenai hal tersebut

dalam melaksanakan pertanggungjawaban tata kelola dana desa, maka pemahaman tentang peraturan keuangan akan berdampak pada peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Aturan ini berguna dijadikan acuan dalam melihat finansial desa dijalankan berdasarkan pada tahap dan kebijakan undang-undang yang sudah ditentukan. (Fajri & Julita, 2021).

Perangkat desa harus memahami peraturan dalam UU NO. 6 tentang desa agar dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan, seperti kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seorang perangkat desa karena terjadi kesalahan dalam menafsirkan UU NO.6 tentang desa tersebut. Kesalahan dalam menentukan hak dan kewajiban dari perangkat desa dalam mengelola dana desa (Purba, 2020).

Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Peraturan Keuangan Desa adalah segala kegiatan yang meliputi (Hartikayanti & Jayanti, 2020):

1. Perencanaan, merupakan kesesuaian rencana tingkatan kontribusi dan mutu RKP desa.
2. Penyatuan penganggaran dan integritas anggaran, harmonisasi kepala desa & BPD, Evaluasi PB Desa per Kecamatan.
3. Pelaksanaan terdiri dari pengadaan, kewajiban perpajakan. Pembukuan administrasi, pencatatan kekayaan desa.
4. Laporan dan tanggung jawab atas total laporan yang mesti dirancang dan langkah pembuatan laporannya.

Berikut antara lain peraturan penyelenggaraan yang sudah dikeluarkan sesudah undang-undang terbit terkhusus berhubungan pada tata kelola keuangan desa (BPKP, 2015):

- a. Kebijakan Pemerintahan No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Kebijakan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- c. Kebijakan Presiden No. 11 Tahun 2015 mengenai Kementerian Dalam Negeri;
- d. Kebijakan Presiden No.12 Tahun 2015 mengenai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- e. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 mengenai Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- f. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- i. Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- j. Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pendampingan Desa;
- k. Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- l. Kebijakan Kementerian Keuangan No.241/PMK.07/2014 mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- m. Kebijakan Kementerian Keuangan No.250/PMK.07/2014 mengenai Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- n. Kebijakan Kementerian Keuangan No. 263/PMK.05/2014 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

2.2 Hasil Penelitian yang relevan

Tujuan dari tinjauan penelitian terdahulu adalah untuk menentukan metode yang digunakan pada saat penelitian dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dalam menulis dan menganalisis oleh peneliti dalam penelitiannya. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang relevan :

TABEL 2. 1
PENELITIAN YANG RELEVAN

No .	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Heni Nurani Hartikayanti, dan Dwi Jayanti (2020)	Internal Factor Affecting The Accountability Of Village Fund Governance : From Indonesia	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 238 responden. Teknik pengambilan sampel : Sampling jenuh. Teknik pengumpulan data : menggunakan pendekatan <i>explanatory survey</i> . Analisis data : menggunakan <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) yang dioperasikan melalui program Lisrel.	Hasil penelitian ini menampilkan Responsivitas, transparansi, motivasi, pemahaman perstutran keuangan, dan keadilan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan Kompetensi aparatur desa berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di 36 desa di 4 kecamatan di Bandung Raya
2.	Baiq Mira Luthfiani, Thatok Asmony, dan Rr Titiek Herwanti (2020)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah.	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 88 responden. Teknik pengambilan sampel : <i>purposive sampling</i> . Teknik pengumpulan data : data primer diperoleh dengan bantuan instrumen kuisisioner. Analisis data : menggunakan Regresi Linear berganda menggunakan program SPSS 16.0	Menurut temuan penelitian, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh penerapan Siskeudes dan kepatuhan pajak bendahara desa, namun kompetensi perangkat desa dan keterlibatan masyarakat kurang berpengaruh terhadap masalah tersebut. pada 12 Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah

3.	Kartika Restu Aprilya (2020)	Pengaruh Kompetensi aparatur desa, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 100 responden. Teknik pengambilan sampel : <i>Teknik convenience sampling</i> . Teknik pengumpulan data : menggunakan kuesioner . Analisis data : menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 23	Menurut temuan penelitian, di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh komitmen organisasi dan kompetensi perangkat desa, tetapi tidak oleh transparansi atau keterlibatan masyarakat.
4.	Silvi Oktavi (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)	Metode penelitian : Kuantitatif. Populasi : Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengambilan sampel : <i>Purposive Sampling</i> . Teknik pengumpulan data : menggunakan kuisisioner, Studi Kepustakaan dan <i>website</i> . Analisis data : menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan <i>software</i> SPSS versi 23.	Menurut temuan penelitian ini, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara signifikan dan menguntungkan dipengaruhi oleh penggunaan sistem akuntansi dan pengetahuan akuntansi di pemerintah daerah. Hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja entitas pemerintah daerah, berbeda dengan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Namun di Kabupaten Kuantan Singingi, motivasi kerja memiliki pengaruh yang baik dan cukup besar terhadap akuntabilitas kinerja

				instansi pemerintah daerah.
5.	Sahala Purba (2020)	Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 35 responden. Teknik pengambilan sampel : <i>Purposive Sampling</i> . Teknik pengumpulan data : menggunakan Data primer yang Data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data : menggunakan regresi linear berganda	Temuan penelitian menampilkan meskipun kesadaran aparat desa terhadap peran mereka tidak mempengaruhi akuntabilitas mereka dalam mengelola dana desa, peran yang mereka mainkan memang memiliki dampak yang baik.
6.	Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 56 responden. Teknik pengambilan sampel : Teknik sampling. Teknik pengumpulan data : data primer diperoleh dengan bantuan penyebaran angket ke aparat desa . Analisis data : menggunakan teknik analisis regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi, dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sumbergempol Kab. Tulungagung.
7.	Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan (2019)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 76 responden. Teknik pengambilan sampel : <i>Purposive Sampling</i> . Teknik pengumpulan data : Data Primer	Hasil penelitian ini menampilkan transparansi, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif

		Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)	Dengan Instrumen Kuesioner . Analisis data : menggunakan Regresi Linear Berganda.	pada akuntabilitas pengelolaan dana desa disemua desa di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga
8.	Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, dan Gayatri (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 180 responden. Teknik pengambilan sampel : <i>purposive sampling</i> . Teknik pengumpulan data : menggunakan kuesioner dengan dengan skala Likert. Analisis data : menggunakan regresi linear berganda	Studi ini menunjukkan hubungan yang baik antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan keterampilan aparatur desa, kepemimpinan kepala desa, dan keterlibatan masyarakat di desa-desa se-Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
9.	Henny Hendratmi, JMV Mulyadi, dan Tri Widiastuti (2018)	Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 210 responden. Teknik pengambilan sampel : <i>Cluster Sampling</i> . Teknik pengumpulan data : menggunakan wawancara atau mengisi kuesioner. Analisis data : menggunakan regresi linear berganda	Penelitian ini menampilkan transparansi dan komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.

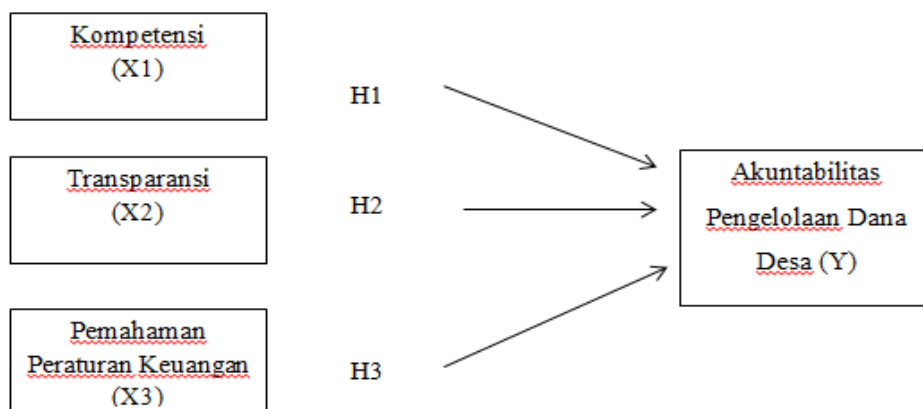
10.	Novindra Dwi Setiana, Nur Laila Yuliani (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian : Kuantitatif. Sampel : 84 responden. Teknik pengambilan sampel : <i>purposive sampling</i> . Teknik pengumpulan data : teknik kuesioner. Analisis data : menggunakan multiple analisis regresi.	Hasil dari penelitian ini menampilkan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sekecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
-----	--	--	--	--

2.3 Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini telah dirancang sebuah rangkaian pemikiran yang bisa sebagai suatu dasar untuk penelitian yang berakhir bisa ditinjau variabel manakah yang sangat menonjol dan berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2. 2
KERANGKA BERFIKIR



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan kapasitas individu serta sikap yang dimiliki aparatur desa, berdasarkan bagaimana mereka menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa (P. P. Dewi et al., 2021). Berdasarkan Konsep teori atribusi jika dihubungkan dengan pemerintahan desa, dimana teori atribusi menerangkan bahwa sikap seseorang dalam menyikapi suatu peristiwa dan menjelaskan alasan perilaku individu.

Dengan pernyataan tersebut kompetensi masuk ke dalam teori atribusi. Karena kompetensi merupakan gambaran sikap atau perilaku seseorang aparatur desa saat proses penyusunan anggaran, perilaku tersebut dapat berupa perilaku yang positif atau perilaku yang negatif. Tergantung bagaimana seorang aparatur desa tersebut menentukan prioritas antara kepentingan pribadi atau bekerja demi kepentingan bersama.

Kompetensi merupakan karakter internal sebagaimana yang sudah dijelaskan pada teori atribusi. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan didalam pekerjaannya (Susandya et al., 2022). Kompetensi diinginkan bisa meminimalisir masalah yang bisa mengakibatkan ketimpangan dari pemerintahan dan publik, melalui cara keterlibatan individu dalam proses penyusunan anggaran dan memiliki pengaruh dalam penyusunan anggaran dana desa. Karena, Akuntabilitas mesti berimbang

dengan kapasitas aparatur desa untuk mengontrol anggaran (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019).

Karena, kompetensi aparatur desa yang baik dapat menambah tingkat wawasan perangkat desa untuk mengerti proses-proses pengelolaan dana desa dan mengimplementasikannya secara efisien. untuk meningkatkan transparansi pengelolaan uang daerah. Jika aparatur desa tidak mampu memahami hal tersebut, maka akan mempengaruhi seberapa baik pemahamannya terhadap laporan keuangan yang dihasilkannya dan seberapa dekat kesesuaian laporan tersebut dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini akan berdampak pada keputusan yang diambil ke depannya dan belum menunjukkan pengelolaan yang akuntabel. Artinya, pengelolaan uang desa akan semakin tinggi akuntabilitasnya jika perangkat daerah semakin kompeten.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan peneliti Dewi et al., (2021), Hartikayanti & Jayanti, (2020), Puspa & Prasetyo, (2020), Aziiz, (2019), Mualifu et al., (2019), Masruhin & Kaukab, (2019), menjelaskan kompetensi perangkat desa memberi pengaruh nyata pada akuntabilitas tata kelola dana desa. Jadi peneliti menarik kesimpulan bahwa:

H₁ : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dinilai suatu hal yang butuh ditinjau lebih dalam terhadap Pengelolaan dana desa. Selain itu adalah wujud transparan pemerintahan dan tanggung jawab pada seluruh aktivitas yang dijalankan. Tercantum dalam Pasal 4

Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 tahun 2017. Kondisi tersebut sejalan dengan teori atribusi dimana karyawan/individu dalam hal ini aparatur desa untuk memberikan keterbukaan dalam hal penyediaan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya masyarakat pada berbagai pihak yang membutuhkan, maka dengan itu transparansi sudah tercipta dalam diri individu.

Transparansi dalam *accountability framework*, merupakan faktor individu dan sistem yang digunakan untuk suatu pemerintah sebagai faktor individu dan sistem yang digunakan untuk suatu pemerintah sebagai faktor utama untuk menambah tingkat akuntabilitas (Mualifu et al., 2019). Seseorang yang memiliki transparansi yang tinggi, akan lebih bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan organisasi. dibandingkan kepentingan pribadi/kelompok tertentu dan akan lebih berusaha untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat kondisi ini didukung oleh teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh adanya faktor dari dalam individu dan faktor dari luar inividu.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan peneliti Fajri & Julita, (2021), Mualifu et al., (2019), Savitri et al., (2019), Wafirotin & Septiviasuti, (2019), dan Hendratmi et al., (2017) menyatakan bahwa transpatansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa :

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.3 Pengaruh Pemahaman Peraturan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan keuangan adalah pemahaman individu aparat desa terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan keuangan desa. Menurut teori atribusi menjelaskan tentang sikap aparatur desa dalam menyikapi pemahaman individu seorang aparatur desa terhadap peraturan keuangan didalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan mampu menyikapi suatu peristiwa. Sejalan dengan teori atribusi, bahwa pemahaman peraturan keuangan merupakan faktor internal didalam diri individu aparaut desa yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pemaaman inidvidu, kemampuan yang dimiliki dan harga diri.

Individu yang memiliki pemahaman yang tinggi cenderung dapat mencapai target didalam suatu pekerjaanya. Dalam Pemahaman tata kelola keuangan dasa dibutuhkan peran perangkat desa. Pengetahuan kepala desa diinginkan dapat meningkatkan akuntabilitas masyarakat dalam mengelola uang desa sesuai UU No 6 Tahun 2014. Sehingga pemahaman tentang pengaturan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa agar bisa memperoleh finansial secara baik (Setiana, D. N., & Yuliani, 2017).

Namun, ketidakpahaman aparatur desa terhadap peraturan keuangan akan berdampak pada kesalahan yang mereka buat dalam laporan keuangan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar pemerintah, yang akan memberi pengaruh keputusan yang dibuat dan tidak menggambarkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Pernyataan tersebut didorong dari riset Endra Wijaya, (2019) dimana hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa variabel pemahaman peraturan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa :

H₃ : Pemahaman Peraturan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan yaitu Agustus 2022 – selesai. Penggunaan waktu pada penelitian ini mulai dari pembuatan susunan proposal riset hingga tuntas tersusun laporan penelitiannya.

Lokasi Penelitian untuk melihat bagaimana pemahaman Pengaruh Kompetensi, Transparansi, dan Pemahaman Peraturan Keuangan Terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 15 desa yang ada di Kecamatan Banyudono dan 13 Desa yang ada di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan terdapat beberapa desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari yang masih belum paham akan mempertanggungjawabkan dana desa .

3.2 Jenis Penelitian

Penggunaan jenis penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Berdasarkan (Sugiyono, 2017) Metode tersebut yaitu metode yang didasarkan pada filosofi prinsip empiris, dan kuantitatif bertujuan untuk menyelidiki populasi ataupun sampel tertentu, mengumpulkan data dengan memanfaatkan data penelitian, serta uji hipotesa yang diterapkan yang Digunakan untuk menganalisis data statistik.

3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yaitu semua penggunaan komponen yang dijadikan kawasan generalisasi. Komponen tersebut yaitu semua target pengukuran yang mewakili unit yang diteliti. Dalam hal ini, populasi yaitu domain umum terbagi atas obyek atau subjek berjumlah serta beberapa karakter yang ditentukan dari penyidik, dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).

Penggunaan populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa yang ada di pemerintahan desa Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 15 Desa dan pemerintahan desa Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 13 Desa.

3.3.2 Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel yaitu komponen total dan karakter populasi. Apabila populasinya besar lalu peneliti tidak dapat memahami semua populasinya, misal sebab adanya batasan anggaran, waktu, sumber daya, maka peneliti bisa memanfaatkan pengambilan sampel melalui populasi itu sendiri. Sampel harus diambil dari populasi yang benar-benar representative (Sugiyono, 2017). Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan beberapa kriteria yang peneliti tentukan, sehingga pada penelitian ini berjumlah 140 orang responden aparatur desa yang ada di kecamatan banyudono dan kecamatan nogosari kabupatenn boyolali yang akan dijelaskan pada tabel 3.1 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 3. 1
SAMPEL PENELITIAN

No.	Nama Desa	Keterangan	Jumlah
Kecamatan Banyudono			
1.	Bendan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
2.	Ngaru-aruru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
3.	Dukuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
4.	Cangkringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
5.	Jembungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 	5 responden

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
6.	Jipangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
7.	Sambon	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
8.	Kuwiran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
9.	Tanjungsari	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
10.	Ketaon	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 	5 responden

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)) 	
11.	Batan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
12.	Bangak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
13.	Trayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
14.	Denggungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	5 responden
15.	Banyudono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 	5 responden

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Kaur Pemerintahan 5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
Kecamatan Nogosari			
16.	Kenteng	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
17.	Potronayan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
18.	Sembungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
19.	Jeron	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
20.	Ketitang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 	

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
21.	Rembun	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
22.	Guli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
23.	Tegalgiri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
24.	Bendo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
25.	Keyongan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 	

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
26.	Pojok	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
27.	Glonggong	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
28.	Pulutan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. Kaur Keuangan 4. Kaur Pemerintahan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 	
Jumlah			140 responden

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik ini yaitu sebuah rangkaian pengambilan sampel dengan memilih beberapa elemen yang dapat diterapkan pada penelitian penelitian (Sugiyono, 2017). Penggunaan teknik untuk mengambil sampel pada penelitian ini dengan

metode *purpose sampling*, merupakan metode untuk mengambil sampel dengan sengaja berdasarkan kriteria yang ditentukan langsung oleh peneliti. Standar penentuan sampel yang ditentukan pada penelitian ini yaitu dengan berikut:

1. Karakteristik responden mencakup umur, pendidikan, jabatan yang dijabat oleh responden, dan lama waktu bekerja di pemerintahan desa.
2. Responden yang telah menjabat selama 1 tahun.
3. Sampel yang akan dipilih yaitu perangkat desa yang hanya memiliki wewenang dalam penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban dana desa.

3.4 Data dan Sumber Data

3.4.1 Data

Penggunaan jenis data pada penelitian ini yaitu data primer yang merupakan berbagai data yang dikumpulkan untuk sebuah penelitian dari tempat *actual* terjadinya peristiwa atau diperoleh dari sumbernya yang bisa di dapat langsung dari responden yang dianggap *representative* untuk mengisi daftar pertanyaan yang dibuat melalui instrumen penelitian (Hendratmi et al., 2017).

Data primer pada penelitian yaitu kumpulan data dari jawaban kuisisioner. Kuisisioner tersebut terkait dengan identitas reponden yang meliputi usia, jabatan yang sedang diduduki, lama bekerja, pendidikan terakhir, dan pertanyaan yang berhubungan dengan Kompetensi, Transparansi dan Pemahaman Peraturan Keuangan dimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi.

3.4.2 Sumber Data

Penyebaran kuisisioner *survey* merupakan cara untuk memperoleh sumber data dipenelitian ini. Penyebaran kuisisioner akan di erikan dan akan di jawab oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur keuangan, kaur kesejahteraan, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban dana desa yang ada di seluruh desa wilayah Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan pada penelitian ini menerapkan teknik survei, yakni dengan memperoleh data dari cara mengumpul kuesioner yang didapat degnan langsung melalui responden ataupun narasumber. Kuesioner adalah metode untuk mengumpulkan data melalui tahap memberi pertanyaan secara tulisan pada responden selanjutnya di jawab (Sugiyono, 2017).

Pengumpulan data pada penelitian ini di jalankan dengan penyebaran kuesioner secara langsung ke seluruh kantor Balai desa di wilayah Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.

3.6 Variabel Penelitian

Variable penelitian merupakan sebuah nilai oleh seseorang, obyek ataupun aktivitas yang memiliki jenis tertentu yang di tentukan dari peneliti sehingga di pahami lalu di ambil kesimpulan (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini ada 2 jenis variable yang di gunakan yakni :

3.6.1 Variabel Dependen

Variable ini dikenal dengan variable terikat dimana variabelnya dikarenakan pengaruh ataupun sebagai sebab, dikarenakan terdapat variabel bebas (Sugiyono, 2017). Adapun variabelnya dipenelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3.6.2 Variabel Independen

Variabel ini dikenal juga sebagai variabel bebas yang akan memberikan pengaruh ataupun sebagai akibat perubahan ataupun munculnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017). Variabel independen dipenelitian ini mencakup kompetensi, transparansi, dan pemahaman peraturan keuangan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

TABEL 3. 2
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberi sikap tanggung jawab tindakan dan kinerja individu atau pejabat dalam sebuah bagian komunitas pada pihak yang memiliki hak ataupun wewenang untuk dimintai tanggung jawab. (Hartikayanti & Jayanti, 2020)	<ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban menyampaikan laporan kepada masyarakat2. Pelaporan realisasi penggunaan dana desa sesuai dengan aturan3. Menyampaikan laporan kepada atasan4. Ketepatan laporan realisasi dana desa5. Ketepatan waktu dalam merealisasikan anggaran (Hartikayanti & Jayanti, 2020)

2.	Kompetensi aparaturn desa	Karakteristik yang menjadi dasar setiap orang didalam kemampuan hasil kerja individu yang efektif di tempat kerja, atau kriteria yang digunakan sebagai referensi di tempat kerja, atau pada situasi tertentu (Hartikayanti & Jayanti, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pengelolaan dana desa 2. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan 3. Keahlian dalam menyelesaikan masalah 4. Kemampuan berkomunikasi 5. Menerima kritik dan saran (Hartikayanti & Jayanti, 2020)
3.	Transparansi	Transparansi artinya pemerintahan yang terbuka untuk memberi informasi berhubungan pada aktivitas tata kelola sumber daya masyarakat pada berbagai pihak yang berkepentingan. (Hartikayanti & Jayanti, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi kepada masyarakat 2. Pelaksanaan sosialisasi RAPBDes 3. Keterbukaan proses pengelolaan (Hartikayanti & Jayanti, 2020)
4.	Pemahaman Peraturan Keuangan	Peraturan keuangan adalah pemahaman aparat desa terhadap penyusunan rencana, penyelenggaraan, laporan, dan tanggung jawab keuangan desa. (Hartikayanti & Jayanti, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Penggunaan Keuangan Desa 3. Laporan Pertanggungjawaban 4. Aturan Administratif (Hartikayanti & Jayanti, 2020)

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisa regresi linier ganda merupakan teknik untuk menganalisa data dengan tujuan melakukan uji apakah terdapat pengaruh diantara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan alat bantu SPSS.

3.8.1 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrument penelitian dilakukan agar mengetahui pertanyaan yang akan digunakan apakah layak atau tidak sebagai instrument penelitian dengan menggunakan uji validasi dan uji reliabilitas. Instrument yang diterapkan pada penelitian ini berupa kuisisioner atau angket yang dibuat oleh peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian ini daftar pertanyaan akan diberikan nilai atau skor dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dimana skor 1 menyatakan poin terendah hingga skor 5 menyatakan poin tertinggi. Penggunaan skala likert guna sebagai pengukuran perilaku, asumsi, dan pengetahuan setiap orang ataupunpun suatu kelompok mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2017).

TABEL 3. 3
SKALA LIKERT

No dan Skor	Keterangan
1	Sangat Setuju (SS)
2	Setuju (S)
3	Kurang Setuju (KS)
4	Tidak Setuju (TS)
5	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

1. Uji Validitas

Uji validitas menurut, Ghozali, (2018) merupakan sebuah penggunaan alat dalam pengukuran valid atau tidak sebuah kuesioner, yang dinyatakan valid bila kuesioner tersebut mempunyai pernyataan yang dapat menjelaskan pengukuran suatu hal dari kuesioner. Mengambil keputusan adalah masing-masing indikator valid jika taraf r hitung $>$ r tabel. Untuk menetapkan taraf r hitung dapat diperangkan dari menerapkan program SPSS yang dikatakan melalui taraf

Corrected Item-Total Correlation. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Bila r hitung $>$ r tabel, jadi kuesioner adalah valid.
- b. Bila r hitung $<$ r tabel, jadi kuesioner adalah tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berdasarkan, Ghazali, (2018) merupakan suatu alat ukur yang digunakan dalam pengukuran sebuah kuesioner sebagai indikator oleh variabel konstruk. Kuesioner reliabel yaitu jika diujikan terus menerus terhadap kelompok serupa yang dapat memperoleh data serupa. Langkah untuk mengukur yaitu menerapkan rumus Alpha Cronbach dimana uji menerapkan program SPSS apabila taraf Alpha Cronbach pada suatu kuesioner $>$ 0.6 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan suatu pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya model regresi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

1. Uji Normalitas

Digunakan untuk menguji model regresi, variabel bebas dan terikat memiliki peran normal ataupun tidak sehingga layak untuk dianalisis (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik bisa dikatakan apabila mempunyai peran data normal ataupun mengarah kenormal. Pengujian ini bisa dijalankan menerapkan pengujian *kolmogorof Smirnov* (Uji K-S).

Jika probabilitas Uji K-S menunjukkan angka signifikansi (sig) $> \alpha = 0,05$, maka data memiliki distribusi normal, sedangkan apabila angka signifikansi (sig) $< \alpha = 0,05$ maka data memiliki distribusi yang tidak normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas, menurut Ghozali, (2018) bertujuan sebagai pengujian model regresi tidak sama variance oleh residu satu observasi kepada observasi lainnya stabil atau dikenal dengan homoskedastisitas. Uji heterokedastisitas dilaksanakan memakai Uji glejser dimana nilai absolut residual dari indikasi heterokedastisitas akan di regresi ketika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 0,5% (Yudhitaningsih & Safrida, 2018).

3. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini memiliki tujuan guna mendeteksi atau melakukan uji model regresi yang didapat ada hubungan antar variabel independen hang satu dengan variabel independen yang lainnya. Pada model regresi secara baik harus tidak ada multikolinearitas dari variabel independen. Pengujian ini juga mampu ditinjau berdasarkan taraf tolerance ataupun varfance inflation factor (VID). Apabila VIF lebih besar dari 10 dan taraf tolerance lebih kecil dari 0.10 akan terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3.8.3 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Pengujian ini diterapkan guna melakukan uji hubungan antara vairbel independen pada dependen secara simultan. Pengujiannya menggunakan cara perbandingan F hitung dengan F tabel. Uji ini digunakan untuk mengetahui seluruh

variabel benas memberi pengaruh pada variabel terikat serta guna melihat kelayakan model regresi yang diterapkan pada penelitian ini (Ghozali, 2018).

Jika nilai signifikansi (sig) dari $F \leq \alpha$ sebesar 5%, maka model regresi tersebut memenuhi syarat untuk uji kelayakan model. Kesimpulan yang telah diambil melalui uji F yang telah dilakukan, apabila taraf 0,05 $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil ini menampilkan berbagai variabel bebas yang telah ditentukan memiliki efek nyata pada variabel terikat. Begitupun sebaliknya.

2. Uji keofisien determinasi (R^2)

Uji ini merupakan alat yang dipakai guna pengukuran jarak kapasitas model untuk mendeskripsikan jenis variabel independen (Ghozali, 2018). Selain itu juga guna menampilkan besar kecilnya efek antara variabel independen dengan dependen. Taraf hasil memiliki interval dari 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Bila taraf Adj R^2 mengarah ke nilai 1 maka pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen semakin kuat, begitupun dengan sebaliknya.

3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisa ini merupakan hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih variabel (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y). model regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$APDD = \beta_0 + \beta_1 \text{Komp} + \beta_2 \text{Trans} + \beta_3 \text{Ppk} + e$$

Keterangan :

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

β_0 = Konstanta

β_i = Koefisien Regresi, $i=1,2,3$.

Komp = Kompetensi aparatur desa

Trans= Transparansi

Ppk = Pemahaman Peraturan Keuangan

e = Error term (Tingkat Kesalahan)

3.8.5 Uji Hipotesis (Uji t)

Tujuan penggunaan uji ini adalah guna mendapatkan signifikansi disetiap variabel independen yang berpengaruh pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui uji hipotesis yang sudah diajukan, maka menggunakan uji statistik t sebagai uji pengaruh antar variabel. Alat yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan program SPSS for windows. Pengambilan keputusan penerimaan hipotesis positif atau negative pada uji t adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga secara statistik data yang ada membuktikan bahwa variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel bebas.
2. Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga secara statistik data yang ada membuktikan bahwa variabel bebas berpengaruh negatif terhadap variabel bebas.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Proses Penelitian

Terdapat 22 kecamatan yang ada Di Kabupaten Boyolali, dari 22 kecamatan yang ada yang di gunakan peneliti ada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari. Kecamatan Banyudono merupakan kecamatan yang memiliki populasi pendudukan penduduk sebanyak 52.947 jiwa, dengan luas wilayah 2.537,9 Ha dengan Kepadatan penduduk 2.087 jiwa/Km 2. Kecamatan Banyudono terletak pada ketinggian ≥ 150 m dari permukaan air laut dengan satuan mdpl dan kondisi iklim yang panas, serta curah hujan 2.571 Mm dengan jumlah hari hujan 133 Hh. Kecamatan Banyudono memiliki 15 desa, dan berikut in adalah batas-batas kewilayahan Kecamatan Banyudono :

Batas Utara : Kecamatan Sambu

Batas Selatan : Kecamatan Sawit

Batas Barat : Kecamatan Teras

Batas Timur : Kecamatan Kartasura (Batas Kabupaten Sukoharjo)

Kecamatan Nogosari merupakan kecamatan yang memiliki populasi pendudukan penduduk sebanyak 60, 745 jiwa, dengan luas wilayah 55, 08 km² dengan Kepadatan penduduk 2.087 jiwa/Km 2. Kecamatan Nogosari terletak pada ketinggian ≥ 150 m dari permukaan air laut dengan satuan mdpl dan kondisi iklim

yang panas, serta curah hujan 2.571 Mm dengan jumlah hari hujan 133 Hh. Kecamatan Nogosari memiliki 13 desa, dan berikut ini adalah batas-batas kewilayahan Kecamatan Nogosari :

Batas Utara : Kecamatan Andong

Batas Selatan : Kecamatan Sambu

Batas Barat : Kecamatan Simo

Batas Timur : Kecamatan Ngemplak

Pada tanggal 25 oktober 2022 penulis mengajukan surat penelitian resmi dari kampus yang ditujukan untuk Kantor Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari. Sehingga pada tanggal 26 Oktober 2022 penulis mendatangi Kantor Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari untuk mendapatkan surat ijin penelitian di setiap Kantor Kepala Desa Se-Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari. Kemudian, pada tanggal 27 Oktober 2022 penulis mendapatkan surat ijin penelitian dari Kantor Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari untuk diteruskan di seluruh Kantor Kepala Desa Se-Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari yang ditujukan untuk Kepala Desa Se-Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari. Setelah penulis mendapatkan surat ijin penelitian dari Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.

Penulis memulai mendatangi satu persatu kantor kepala desa yang ada di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Penelitian pengumpulan data mulai dilaksanakan pada tanggal 08 November 2022. Didalam proses pengumpulan data, pembagian

kuesioner dilakukan secara langsung. Responden memiliki waktu 1 bulan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang terdapat pada kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti. Seharusnya peneliti hanya memberikan jangka waktu pengerjaan kuesioner selama 1 minggu, karena pihak perangkat desa sedang banyak pekerjaan dan surat ijin penelitian tertulis jangka waktu 1 bulan maka para responden meminta kelonggaran waktu dalam pengerjaan kuesioner.

4.2 Proses Deskripsi Karakter Responden

4.2.1 Perincian Tingkat Pengembalian Responden

Berdasarkan data responden terdapat tingkat pengembalian kuesioner responden yang dapat diolah dan disajikan kedalam tabel 4.1 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 1
TINGKAT PENGEMBALIAN RESPONDEN

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
Kuesioner yang disebar	140	100%
Kuesioner yang Kembali	128	91%
Kuesioner yang Tidak Kembali	12	9%
Kuesioner yang Tidak Lengkap	13	9%
Kuesioner yang diolah	115	90%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh kuesioner yang telah disebar sebanyak 140 kuesioner dan kuesioner yang dikembalikan mencapai 128 kuesioner atau tingkat presentase pengembalian yang diperoleh sebesar 91%. Sementara kuesioner yang tidak dikembalikan mencapai 12 kuesioner atau sebesar 9%. Kuesioner yang tidak kembali disebabkan karena hilangnya berkas kuesioner oleh pihak responden.

Kuesioner yang tidak dapat dilakukan pengolahan mencapai 13 kuesioner atau sebesar 9%. Kuesioner yang tidak bisa dilakukan pengolahan sebab cacat atau tidak bisa digunakan merupakan kuesioner yang tidak lengkap dalam hal pengisian.

4.2.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Data responden berdasarkan jenis kelamin responden yang dapat diolah dan disajikan kedalam tabel 4.2 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 2
DATA RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN RESPONDEN

Keterangan	Jumlah Responden	
	Dalam Angka	Presentase
Laki-laki	95	88%
Perempuan	20	12%
Total	115	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh data responden berdasarkan jenis kelamin yang menampilkan sebagian besar responden yang turut partisipasi pada penelitian ini dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 95 orang responden atau sebesar 88%, sedangkan untuk reponden yangdengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 20 orang responden atau sebesar 12%.

4.2.3 Data Responden Berdasarkan Jabatan Responden

Data responden berdasarkan Jabatan yang diampu oleh responden yang dapat diolah dan disajikan kedalam tabel 4.3 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 3
DATA RESPONDEN BERDASARKAN JABATAN RESPONDEN

Keterangan	Jumlah Responden	
	Dalam Angka	Presentase
Kepala Desa	27	23%
Sekertaris Desa	27	23%
Kaur Keuangan	19	17%
Kaur Pemerintahan	19	17%
BPD	23	20%
Total	115	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh jabatan responden yang turut ikut serta pada penelitian ini, yaitu kepala desa sebanyak 27 orang responden atau sebesar 23%, Sekretaris Desa sebanyak 27 orang responden atau sebesar 23%, Kaur Keuangan sebanyak 19 orang responden atau sebesar 17%, Kaur Pemerintahan sebanyak 19 orang responden atau sebesar 17%, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 23 orang responden atau sebesar 20%.

4.2.4 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data responden berdasarkan tingkat pendidikan responden yang dapat diolah dan disajikan kedalam tabel 4.4 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 4
DATA RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Keterangan	Jumlah Responden	
	Dalam Angka	Presentase
S2	0	0%
S1	51	44%
D3	12	10%
SMA/K	52	45%
Total	115	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa tingkat pendidikan para Responden yang ikut serta pada penelitian ini, yaitu meliputi, pendidikan SMA/K sebanyak 52 Orang ataupun sebesar 45%, pendidikan D3 sebanyak 12 Orang ataupun sebesar 10 %, Pendidikan S1 sebanyak 52 orang ataupun sebesar 44%, sedangkan untuk pendidikan S2 Sebanyak 0%.

4.2.5 Data Responden Berdasarkan Usia Responden

Data responden berdasarkan usia responden yang dapat diolah dan disajikan kedalam tabel 4.5 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 5
DATA RESPONDEN BERDASARKAN USIA RESPONDEN

Keterangan	Jumlah Responden	
	Dalam Angka	Presentase
17-25 Tahun	2	2%
26-34 Tahun	23	20%
35-43 Tahun	41	36%
> 44 Tahun	49	43%
Total	115	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh tingkat usia responden yang ikut serta pada penelitian ini, yaitu terdiri dari, terdapat 49 responden yang dengan usia > 44 tahun atau sebesar 43 %, terdapat 41 responden yang dengan usia 35-43 tahun atau sebesar 36%, terdapat 23 responden yang dengan usia 26-34 tahun atau sebesar 20%, dan terdapat 2 responden yang dengan usia 17-25 tahun atau sebesar 2%.

4.2.6 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Data responden berdasarkan lama bekerja responden yang dapat diolah dan disajikan kedalam tabel 4.6 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 6
DATA RESPONDEN BERDASARKAN LAMA BEKERJA

Keterangan	Jumlah Responden	
	Dalam Angka	Presentase
< 1 Tahun	0	0%
1-2 Tahun	13	11%
3-5 Tahun	55	48%
> 5 Tahun	47	41%
Total	115	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh dari 115 orang responden, terdiri dari responden yang lama bekerjanya > 5 tahun mencapai 47 orang ataupun sebesar 41%, responden yang lama bekerjanya 3-5 tahun mencapai 55 orang ataupun sebesar 48%, responden yang lama bekerjanya 1-2 tahun mencapai 13 orang ataupun sebesar 11%, dan tidak ada responden yang lama bekerjanya < 1 tahun atau 0%.

4.3 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil pengukuran masing-masing variabel digunakan lima kategori, antara lain : sangat tinggi, tinggi, sedang, dan sangat rendah. Jadi nilai paling tinggi yakni 5 dan paling rendah 1, jadi diperoleh interval dengan berikut:

$$= \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}$$

Jumlah Kategori

$$i = \frac{5-1}{5}$$

$$i = 0,8$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan kategori sebagai berikut

:

TABEL 4. 7
PENILAIAN ANALISIS DESKRIPTIF

Kategori	Interval
Sangat Tinggi	$4,2 \leq x \leq 5$
Tinggi	$4,2 \leq x < 4,2$
Sedang	$2,6 \leq x < 3,4$
Rendah	$1,8 \leq x < 2,6$
Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 1,8$

Pengukuran Variabel Penelitian ini menggunakan Statistik Deskriptif dengan jumlah responden 64 dimana masing-masing variabel tersebut adalah kompetensi, transparansi, dan pemahaman peraturan keuangan. Hasil penelitian analisis statistic deskriptif variabel kompetensi dapat dilihat kedalam tabel 4.8 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 8
DESKRIPSI VARIABEL KOMPETENSI

		Statistics						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
N	Valid	115	115	115	115	115	115	115
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.33	4.22	3.97	4.19	4.27	4.30	4.28
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.603	.659	.783	.687	.667	.675	.720
Variance		.364	.435	.613	.472	.444	.456	.518
Range		2	2	3	3	2	2	2
Minimum		3	3	2	2	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5	5

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menampilkan variabel kompetensi memiliki rata-rata 4,22 sehingga dapat dikategorikan tinggi. Rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan pertama dengan rata-rata 4,33 yang menampilkan responden menilai

indicator pertama menjadi faktor utama dari kompetensi aparatur desa. Dan rata-rata paling rendah ada di pertanyaan poin Tiga dengan rata-rata 3,97. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif variabel transparansi dapat dilihat kedalam tabel 4.9 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 9
DESKRIPSI VARIABEL TRANSPARANSI

		Statistics						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
N	Valid	115	115	115	115	115	115	115
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.30	4.24	4.18	4.24	4.27	4.26	3.85
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.675	.615	.696	.683	.692	.636	.740
Variance		.456	.379	.484	.467	.479	.405	.548
Range		2	2	2	3	3	2	3
Minimum		3	3	3	2	2	3	2
Maximum		5	5	5	5	5	5	5

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menampilkan variabel Transparansi memiliki rata-rata 4,19 sehingga dapat dikategorikan tinggi. Rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan Pertama dengan rata-rata 4,30 yang menampilkan responden menilai indicator Pertama menjadi faktor utama dari Transparansi. Dan rata-rata paling rendah ada di pertanyaan poin tujuh dengan rata-rata 3,85. Hasil penelitian analisis statistic deskriptif variabel pemahaman peraturan keuangan dapat dilihat kedalam tabel 4.10 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 10
DESKRIPSI VARIABEL PEMAHAMAN PERATURAN KEUANGAN

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
N	Valid	115	115	115	115	115
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.22	4.14	4.08	4.12	4.07
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.711	.712	.715	.703	.792
Variance		.505	.507	.511	.494	.627
Range		2	2	2	2	3
Minimum		3	3	3	3	2
Maximum		5	5	5	5	5

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menampilkan variabel Pemahaman Peraturan Keuangan memiliki rata-rata 4,12 sehingga dapat dikategorikan tinggi. Rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan Pertama dengan rata-rata 4,22 yang menampilkan responden menilai indicator Pertama menjadi faktor utama dari Pemahaman Peraturan Keuangan. Dan rata-rata paling rendah ada di pertanyaan poin lima dengan rata-rata 4,07. Setelah pengolahan data melalui SPSS versi 25 dan Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat disajikan kedalam tabel 4.11 di bawah ini sebagai berikut :

TABEL 4. 11
DESKRIPSI VARIABEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

		Statistics						
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
N	Valid	115	115	115	115	115	115	115
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.37	4.38	3.75	4.40	4.41	4.26	4.29
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.694	.643	1.050	.632	.647	.663	.659
Variance		.482	.414	1.103	.400	.419	.440	.434
Range		2	2	4	2	2	2	2
Minimum		3	3	1	3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5	5

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menampilkan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki rata-rata 4,26 sehingga dapat dikategorikan Sangat tinggi. Rata-rata tertinggi terdapat pada pertanyaan Kelima dengan rata-rata 4,41 yang menampilkan responden menilai indikator Pertama menjadi faktor utama dari Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dan rata-rata paling rendah ada di pertanyaan poin tiga dengan rata-rata 3,75.

4.4 Pengujian Dan Hasil Analisis Data

4.4.1 Uji Instrumen Data

1. Uji Validitas

Validitas kuesioner dievaluasi dengan menggunakan uji validitas. Membandingkan nilai dapat digunakan untuk melakukan uji validitas r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, yaitu n sebagai penggunaan total seluruh sampel. Suatu indikator pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilainya positif.

Jumlah sampel yang di olah (n) dalam penelitian ini sebanyak 64 responden dan besar $df = 115-2$ menjadi 113 dengan $alpha$ 0,05 Maka nilai r_{tabel} adalah 0,183. Adapun hasil dari uji validitas data pada penelitian ini bisa diliat pada table d bawah berikut ini :

a. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil uji validitas variabel akuntabilitas dana desa disajikan pada tabel 4.12 dibawah ini:

TABEL 4. 12
HASIL UJI VALIDASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Y)

Keterangan	R_{table}	R_{hitung}	Signifikasi	Validasi
Pertanyaan 1	0,183	0,688	0,00	Valid
Pertanyaan 2	0,183	0,751	0,00	Valid
Pertanyaan 3	0,183	0,545	0,00	Valid
Pertanyaan 4	0,183	0,777	0,00	Valid
Pertanyaan 5	0,183	0,678	0,00	Valid
Pertanyaan 6	0,183	0,664	0,00	Valid
Pertanyaan 7	0,183	0,614	0,00	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 4.12, didapat hasil R_{hitung} variabel Akuntabilitas pengelolaan dana desa $>$ dari nilai R_{tabel} 0,183 dengan signifikasi $<$ 0,05 jadi bisa diambil kesimpulan instrument pertanyaan variabel Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang digunakan sesuai alat ukur penelitian adalah valid.

b. Variabel Kompetensi (X₁)

Hasil uji validitas variabel kompetensi disajikan pada tabel 4.13 dibawah ini:

TABEL 4. 13
HASIL UJI VALIDASI KOMPETENSI (X₁)

Keterangan	R _{tabel}	R _{hitung}	Signifikasi	Validasi
Pertanyaan 1	0,183	0,718	0,00	Valid
Pertanyaan 2	0,183	0,769	0,00	Valid
Pertanyaan 3	0,183	0,579	0,00	Valid
Pertanyaan 4	0,183	0,7773	0,00	Valid
Pertanyaan 5	0,183	0,795	0,00	Valid
Pertanyaan 6	0,183	0,786	0,00	Valid
Pertanyaan 7	0,183	0,723	0,00	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 4.13, didapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan untuk variabel kompetensi memiliki nilai R hitung variabel Kompetensi > dari nilai R tabel 0,183 dengan signifikasi < 0,05 jadi bisa diambil kesimpulan untuk instrument pertanyaan variabel Kompetensi yang digunakan sesuai alat ukur penelitian adalah valid.

c. Variabel Transparansi (X_2)

Hasil uji validitas variabel kompetensi disajikan pada tabel 4.13 dibawah ini:

TABEL 4. 14
HASIL UJI VALIDASI TRANSPARANSI (X_2)

Keterangan	R _{tabel}	R _{hitung}	Signifikasi	Validasi
Pertanyaan 1	0,183	0,726	0,00	Valid
Pertanyaan 2	0,183	0,679	0,00	Valid
Pertanyaan 3	0,183	0,771	0,00	Valid
Pertanyaan 4	0,183	0,823	0,00	Valid
Pertanyaan 5	0,183	0,798	0,00	Valid
Pertanyaan 6	0,183	0,783	0,00	Valid
Pertanyaan 7	0,183	0,683	0,00	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 4.14, didapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan untuk variabel transparansi memiliki nilai R hitung variabel transparansi > dari nilai R tabel 0,183 dengan signifikasi < 0,05 jadi bisa diambil kesimpulan untuk instrument pertanyaan variabel transparansi yang digunakan sesuai alat ukur penelitian adalah valid.

d. Variabel Pemahaman Peraturan Keuangan (X_3)

TABEL 4. 15
HASIL UJI VALIDASI TRANSPARANSI (X_3)

Keterangan	R _{tabel}	R _{hitung}	Signifikasi	Validasi
Pertanyaan 1	0,183	0,774	0,00	Valid
Pertanyaan 2	0,183	0,815	0,00	Valid
Pertanyaan 3	0,183	0,778	0,00	Valid
Pertanyaan 4	0,183	0,760	0,00	Valid
Pertanyaan 5	0,183	0,745	0,00	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 4.15, didapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan untuk variabel pemahaman peraturan keuangan memiliki nilai R hitung variabel pemahaman peraturan keuangan > dari nilai R tabel 0,183 dengan signifikasi < 0,05 jadi bisa diambil kesimpulan untuk instrument pertanyaan variabel pemahaman peraturan keuangan yang digunakan sesuai alat ukur penelitian adalah valid..

2. Uji Reliabilitas

Uji ketergantungan dimaksudkan untuk mengukur seberapa konsisten atau dapat dipercaya seorang responden memberikan tanggapan. Para peneliti menguji kehandalan metode *Cornbatch's alpha* (α) yakni suatu instrument dikatakan reliable jika *Cornbatch's alpha* lebih besar dari 0,60 atau lebih. Hasil dari pengujian reliabilitas data di setiap variabel penelitian dapat disajikan pada tabel 4.16 sebagai berikut:

TABEL 4. 16
HASIL UJI RELIABILITAS

No	Variabel	Nilai α	<i>Cornbatch's alpa</i>	Keterangan
1	Kompetensi	0,60	0,856	Handal
2	Transparansi	0,60	0,865	Handal
3	Pemahaman Peraturan Keuangan	0,60	0,832	Handal
4	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,60	0,773	Handal

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Tabel 4.16 menampilkan nilai dari *Cornbatch's alpa* masing-masing variabel lebih besar dari 0,60. Untuk variabel Kompetensi memiliki nilai *Cornbatch's alpa* $0,856 > 0,60$, variabel Transparansi memiliki nilai *Cornbatch's alpa* $0,856 > 0,60$, variabel pemahaman peraturan keuangan memiliki nilai *Cornbatch's alpa* $0,832 > 0,60$, dan nilai variabel Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai $0,773 > 0,60$. Hal tersebut membuktikan bahwa instrument dari kuesioner yang diterapkan guna menerangkan variabel kompetensi, transparansi, pemahaman peraturan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan baik dan bisa diyakini dijadikan instrumen pengukuran variabel.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini berguna dalam melihat apakah data tersebut berdistribusi normal dan layak untuk dianalisis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-smirov (K-S), data dapat dikatakan terdistribusi normal bila taraf koefisien asymp sign (2_tailed) lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil uji normalitas pada penelitian ini bisa disajikan pada tabel 4.17 sebagai berikut :

TABEL 4. 17
HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.11973209
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.065
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.090 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 bisa ditinjau bahwa nilai Asmp. Sig. (2_tailed) sebesar 0,90 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Maka dapat disimpulkan data pada penelitian ini terdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan guna melakukan uji terhadap model regresi adanya hasil tidak sama varian dari residu satu observasi pada observasi lainnya. Pengujian ini diterapkan pada penelitian yaitu pengujian glejser dengan melihat taraf signifikansinya di atas tingkat kepercayaan yakni 0.05. Adapun tabel 4.18 yaitu hasil dari pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini yang disajikan sebagai berikut :

TABEL 4. 18
HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

Variabel	Sig	Keterangan
Kompetensi (X1)	0,594	Bebas Dari Heterokedastisitas
Transparansi (X2)	0,621	Bebas Dari Heterokedastisitas
Pemahaman Peraturan Keuangan (X3)	0,690	Bebas Dari Heterokedastisitas

Sumber : Data Primer diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan hasil uji Heterokedastisitas dimana setiap variabel mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$, variabel Kompetensi didapat hasil signifikansi sebesar 0,594, variabel Transparansi didapat hasil signifikansi sebesar 0,621, dan variabel Pemahaman Peraturan Keuangan didapat hasil signifikansi sebesar 0,690. Sehingga bisa diambil kesimpulan masing-masing variabel tidak terjadi heteroskedastisitas dan mencukupi kriteria.

3. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini memiliki tujuan guna model regresi mengidentifikasi hubungan variabel independen (bebas). Semestinya tidak terdapat korelasi dari variabel pada model regresi yang relevan. Taraf tolerance di bawah 0,1 dan VIF atau Variance Inflation Factor di atas 10 bisa diterapkan guna menentukan terdapat atau tidak multikolinearitas pada model regresi.

TABEL 4. 19
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi (X1)	0,408	2,452	Tidak Adanya Multikolinearitas
Transparansi (X2)	0,331	3,018	Tidak Adanya Multikolinearitas
Pemahaman Peraturan Keuangan (X3)	0,524	1,907	Tidak Adanya Multikolinearitas

Sumber : Data Primer diolah, 2023.

Dari tabel 4.19 menampilkan hasil setiap variabel memiliki taraf VIF di bawah 10 ($VIF < 10$) serta taraf tolerance di atas 0.10 ($tolerance > 0.10$). Jadi bisa diambil kesimpulan data pada penelitian ini tanpa multikolinearitas yang mencukupi analisa regresi.

4.5 Uji Ketetapan Model

1. Uji F (Simultan)

Pegujian ini guna memastikan variabel independen yang masuk di model yang mempunyai dampak keseluruhan pada variabel dependen. Pentingnya nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dibandingkan dalam pengujian ini untuk menentukan apakah model tersebut akurat yang artinya pengaruh secara bersama. Dibawah ini merupakan tabel hasil uji statistik F :

TABEL 4. 20
HASIL UJI STATISTIK F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	749.211	3	249.737	54.118	.000 ^b
	Residual	512.232	111	4.615		
	Total	1261.443	114			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Keuangan, Kompetensi , Transparansi

Berdasarkan tabel 4.20 menampilkan hasil nilai F_{hitung} sebesar 54,118 dan nilai $F_{tabel} = f(k; n-k)$, $F = (3; 115-3)$, $F_{tabel} = (3;112) = 2.69$ dengan tingkat kesalahan 5%. Sehingga nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} atau $54,118 > 2.69$. Dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi (X1), Transparansi (X2), Dan Pemahaman Peraturan Keuangan (X3)

Secara bersamaan Berpengaru signifikan teraadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada seluruh desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.

2. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini berguna sebagai alat pengukuran kemampuan model dalam menerangkan perubahan variabel bebas dengan melihat hilai Adjusted R Square Koefisien yang nantinya diperoleh dari hasil pengujian. Adjusted R Square Koefisien memiliki rentan nilai 0 sampai 1. Jika hasil penelitian Adj R2 diperoleh angka mendekati 1 maka asumsinya adalah pengaruh yang dihasilkan kuat antara variabel independen dengan variabel dependen dan terdapat sebagian besar informasi yang diperoleh sebagai bahan prediksi perubahan variabel dependen. Dibawah ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi yang dilakukan oleh peneliti yang disajikan pada tabel 4.21 sebagai berikut :

TABEL 4. 21
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771 ^a	.594	.583	2.148

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Keuangan, Kompetensi , Transparansi

Berdasarkan Tabel 4.21 menampilkan hasil nilai Adjusted R Square yang diperoleh adalah 0,583. Yang artinya variabel kompetensi, transparansi, dan pemahaman peraturan keuangan dapat menjelaskan 58,3% Variasi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan 41,4% (100%-58,3%) nya lagi dapat dijelaskan faktor diluar model regresi dalam penelitian ini.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini diterapkan guna mengukur intensitas korelasi dua variabel bahkan lebih. Hasil dari pengujian ini dapat menampilkan apakah terdapat efek antara kompetensi, transparansi, serta pemahaman peraturan keuangan pada akuntabilitas tata kelola dana desa di semua desa Kec. Banyudono dan Kec. Nogosari. Berikut merupakan hasil pengujian analisis regresi linier berganda yang dilihat pada tabel 4.22 sebagai berikut :

TABEL 4. 22
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.375	1.864		3.420	.001
	Kompetensi	.264	.090	.277	2.925	.004
	Transparansi	.394	.102	.406	3.865	.000
	Pemahaman Peraturan Keuangan	.202	.099	.172	2.055	.042

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sumber : Data Primer diolah, 2023

Persamaan regresi yang dianalisis dengan SPSS dapat diuraikan sebagai berikut guna mendapat pengaruh setiap variabel pada variabel dependen:

$$APDD = 6.375 + 0,264 \text{ Komp} + 0,394 \text{ Trans} + 0,202 \text{ PPK} + e$$

Keterangan dari rumus di atas diuraikan dengan berikut :

1. Berdasarkan hasil tabel 4.22 dijelaskan bahwa nilai konsta (α) sebesar 6.375 yang artinya, apabila variabel independen (kompetensi, transparansi, dan pemahaman peraturan keuangan) memiliki nilai konstan pada angka 0, maka

nilai variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa) sebesar 6.375 satuan.

2. Nilai koefisien regresi β_1 Kompetensi (X1) sebesar 0,264 yang menunjukkan tanda positif, artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel kompetensi (X1), jadi dapat menambah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,264.
3. Nilai koefisien regresi β_2 Transparansi (X2) sebesar 0,394 yang menunjukkan tanda positif, artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel Transparansi (X2), jadi dapat menambah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,394.
4. Nilai koefisien regresi β_3 Pemahaman Peraturan Keuangan (X3) sebesar 0,202 yang menunjukkan tanda positif, artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel Pemahaman Peraturan Keuangan (X3), jadi dapat menambah tingkat 0,202.

4.7 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Pengujian ini berguna menampilkan jarak suatu variabel penjelas ataupun dengan individual untuk menjelaskan jenis variabel dependen. Pengambilan keputusan yang diambil melalui uji t yang telah diterapkan melalui tahap perbandingan taraf signifikan yang berdasarkan dengan signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 dan bisa ditinjau berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel. T Tabel diperoleh dari $T \text{ Table} = \alpha/2 ; n-k-1 = 0,05/2 ; 115 - 3 - 1 = 0,025 ; 111 = 1.98$. berikut ini merupakan hasil uji statistic t yang di sajikan pada tabel 4.23 sebagai berikut :

TABEL 4. 23
HASIL UJI STATISTIK T

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.375	1.864		3.420	.001
	Kompetensi	.264	.090	.277	2.925	.004
	Transparansi	.394	.102	.406	3.865	.000
	Pemahaman Peraturan Keuangan	.202	.099	.172	2.055	.042

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil pengambilan keputusan yang dapat diambil melalui uji t sebagai berikut :

- a. Hasil Uji t menampilkan nilai signifikansi Kompetensi adalah $0,004 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,925 > 1.981$ maka H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima. Yang artinya, Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan arah positif dan signifikan.
- b. Hasil Uji t Hasil Uji t menampilkan nilai signifikansi Transparansi adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,865 > 1.981$ maka H_{o2} ditolak dan H_{a2} diterima. Yang artinya, Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan arah positif dan signifikan.
- c. Hasil Uji t menampilkan nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Keuangan adalah $0,042 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,055 > 1.981$ maka H_{o3} ditolak dan H_{a3} diterima. Yang artinya, Pemahaman Peraturan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan arah positif dan signifikan.

4.8 Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa

Pengajuan hipotesis pertama dilakukan pada penelitian ini yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil analisis dari uji t pada variabel kompetensi (X_1) menampilkan nilai signifikasinya sebesar $0,004 > 0,05$ dari hasil tersebut diperoleh t_{hitung} sebesar 2,925 $< t_{tabel}$ 1,981, jadi bisa diambil kesimpulan hipotesis pertama diterima, artinya secara statistic data yang didapat membuktikan bahwa variabel kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Kompetensi yang dimiliki aparatur desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dapat mempengaruhi tingkat potensi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dimana, semakin banyak aparatur desa yang kompeten akan membuat suatu laporan pertanggungjawaban semakin baik. Hal ini berarti, kompetensi individu aparatur desa dalam pengetahuan, keahlian, dan berperilaku yang terdapat dalam diri yang dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini menampilkan tingginya Kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari berpengaruh terhadap akuntabilitas penegelolaan dana desa. Kinerja individu dapat optimal jika individu tersebut memiliki kompetensi yang dapat diandalkan dibidangnya. Keandalan kompetensi aparatur sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu seperti

kompetensi pemecahan masalah, kompetensi interaksi dengan orang lain atau masyarakat, dan kompetensi kinerja dengan aparat desa yang lainnya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dari riset yang dijalankan (Aprilya & Fitria, 2020) Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Puspa & Prasetyo, (2020) kompetensi aparatur desa mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab mempunyai integritas dan memiliki kejujuran terhadap pihak lain dalam hal ini masyarakat. Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang tinggi sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah dituntut untuk dapat mengimplementasikan *good government governance*.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa

Pengujian hipotesa kedua dilakukan pada penelitian ini yaitu Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil analisis dari uji t pada variabel Transparansi (X_2) menampilkan nilai signifikasinya sebesar $0,000 < 0,05$ dari hasil tersebut diperoleh t_{hitung} sebesar $3,865 > T_{tabel} 1,981$, jadi bisa diambil kesimpulan hipotesis kedua diterima, artinya secara statistic data yang ada dapat membuktikan bahwa variabel Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Hal ini menampilkan transparansi yaitu satu dari berbagai bagian terpenting untuk dapat dilakukan oleh aparatur desa dalam mengolah dana desa dan

mempertanggungjawabkannya. Transparansi dalam bahasa lain dapat diartikan sebagai keterbukaan atau *openness* seorang aparat desa dalam memberi informasi dengan kegiatan tata kelola dana desa pada masyarakat. Sehingga demikian tingkat transparansi diseluruh desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari semakin tinggi, baik dan besarnya transparansi yang dipraktekkan atau implementasikan oleh aparatur desa maka berkontribusi pada semkain besar pula penilaian akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Transparansi Seluruh desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari di pengaruhi oleh perangkat desa yang selalu melakukan musyawarah dengan masyarakat akan penggunaan alokasi dana desa dan adanya akses untuk masyarakat untuk dapat memantau informasi mengenai rencana penggunaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa seorang perangkat desa yang peduli terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui semua kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah desa dan telah mencapai target.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fajri & Julita, 2021) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas penelolan dana desa. Menurut penelitian (A. Dewi et al., 2022) transparansi merupakan salah satu prinsip demi tercapainya pemerintahan desa yang baik. Ketika pemerintah desa tidak mampu terbuka dalam memberikan informasi, baik itu pengelolaan keuangan maupun laporan kinerja kepada masyarakat, bagaimana mungkin kinerja organisasi pemerintah desa yang baik dapat tercapai.

3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hipotesa ketiga dilakukan pada penelitian ini yaitu Pengaruh Pemahaman Peraturan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil analisis dari uji t pada variabel Pengaruh Pemahaman Peraturan Keuangan (X_3) menampilkan nilai signifikasinya sebesar $0,042 > 0,05$ dari hasil tersebut diperoleh t_{hitung} sebesar $2,055 < t_{tabel} 1,981$, jadi bisa diambil kesimpulan hipotesis ketiga diterima, artinya secara statistic data yang ada didapat membuktikan bahwa variabel Pengaruh Pemahaman Peraturan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Pemahaman Peraturan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Pemahaman perangkat desa tersebut diharapkan dapat menunjang kemampuan aparatur desa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan desa sehingga bisa dilakukan pelaporan secara rinci dari cara melakukan proses penyusunan tersebut yang sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 yang menunjukkan bahwa dengan aparatur desa memahami penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Rahmadhani & Syahdan, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis Pengaruh Kompetensi, Transparansi, Pemahaman Peraturan Keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan studi kasus seluruh desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari. Berdasarkan analisis yang sudah diutarakan pada bab sebelumnya sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se-Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, atau H_1 diterima
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se-Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, atau H_2 diterima.
3. Pemahaman Peraturan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se-Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, atau H_3 diterima

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti yaitu :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam bentuk kuesioner pertanyaan saja, sehingga pendapat atau jawaban responden kemungkinan belum tertangkap secara nyata.

2. Variabel independen dalam data penelitian ini hanya meliputi kompetensi, transparansi, pemahaman peraturan keuangan.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya sejumlah 115 orang responden perangkat desa Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari.
4. Karena keterbatasan waktu hanya dapat menemui beberapa perangkat desa saja.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan teknik wawancara secara langsung sehingga hasil penelitian akan lebih sempurna.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya seperti variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Pendamping desa atau variabel independen lain yang dapat mengetahui banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menyarankan kepada para perangkat desa Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari untuk meningkatkan pelatihan mengenai pengalokasian dana desa yang diharapkan dapat menambah pengetahuan pertanggungjawab pelaporan dana desa.
4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian serta lokasi yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Dewi, A., Sari, P., Ekonomi, F., & Riau, U. M. (2022). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Pengawasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). 2(1), 86–96.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Dewi, P. P., Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2021). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pen- damping desa terhadap pengelolaan dana desa 1. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(01), 820–829.
- Endra Wijaya, M. F. R. (2019). Practice of Village Fund Management and Its Affecting Factors. *Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*, 13(2), 165–184.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (IX)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hartikayanti, H. N., & Jayanti, D. (2020). Internal Factors Affecting the Accountability of Village Fund Governance: Evidence from Indonesia. *Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 07(11), 628–641. <http://repository.unjani.ac.id/repository/9bb906083711a75d4fbbc1a136561cee.pdf>
- Hendratmi, H., Mulyadi, J., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 76–93. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v3i2.767>
- Karnia, N. D., & Haryanto. (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Motivasi, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Aparat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Khimayah, N. (2018). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas. *13(1)*, 122–133.
- Kriyantono, R. (2014). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian & Praktik*. Edisi Ke 2. Jakarta : KENCANA.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol.1*, Hal 159-180.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Martinko, M. J., Harvey, P., & Dasborough, M. T. (2011). Attribution theory in the organizational sciences: A case of unrealized potential. *Journal of Organizational Behavior*, 32(1), 144–149. <https://doi.org/10.1002/job.690>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa

- (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Oktaviani, S. (2020). Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 484–494. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/894>
- Purba, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 10–19. <https://doi.org/10.30596/jakk.v3i1.5699>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rahmadhani, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa dan Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru.
- Sari, N., & Andra Asmara, J. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 1.
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2019). The effectiveness of village fund management. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1373–1377.
- Setiana, D. N., & Yuliani, L. N. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat

Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquim*, 5, 205–210.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). CV. ALFABETA.

Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>

SK Bupati Boyolali Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2022 Per Triwulan II Tahun 2022 Nomor PE 04.03/LHP-323/PW11/3.1/2022

Temalagi, S., & Anakotta, F. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(1), 51–65. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol2iss1pp51-65>

Wafirotin, K. Z., & Septiviasuti, U. (2019). the Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v14i1.1527>

Wijayanto, A., Gunawan, P. I. K., Alaydrus, A., & Sos, S. (2017). Pengaruh Responsivitas Dan Komitmen Kerja Aparatur Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Bukit Permata Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 67–80.

Yudhitaningsih, A. Y. S., & Safrida, L. (2018). *Persepsi Perangkat Desa Mengenai Pelatihan, motivasi, dan Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)*. 6014, 100–112.

LAMPIRAN

LAMPIRAN. 1 JADWAL PENELITIAN

JADWAL PENELITIAN

No	Bulan Kegiatan	Mei-September				Oktober				November				Desember				Januari-Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X																							
2	Konsultasi	X	X					X																					
3	Revisi Proposal									X	X																		
4	Pengumpulan Data											X	X	X	X														
5	Analisis Data															X	X	X											
6	Penulisan Naskah Akhir Skripsi																	X	X	X									
7	Pendaftaran Munaqosah																		X										
8	Munaqosah																							X					
9	Revisi Skripsi																									X	X	X	

LAMPIRAN. 2 SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN BANYUDONO
Jl. Pasar Pengging ☎ (0271) 784180 Banyudono, Boyolali 57373
email: banyudono@boyolali.go.id

Banyudono, 27 Oktober 2022

Nomor : 074/2846/ 6.9/ 2022
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada:
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan Universitas
Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
di _

SUKOHARJO

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta No. B-3072/Ub.20/F.IV.1/PP.00.9/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Ijin Penelitian, kepada Mahasiswa:

Nama : **ARIZKA DWI NUGRAHENI**
NIM : 185221061
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Banyudono)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas, kami izinkan untuk melakukan Permohonan Ijin Penelitian di Desa-desa pada Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali terhitung mulai 27 Oktober 2022 sampai dengan 27 November 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
I. A r s i p.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN NOGOSARI
Alamat: Jl.Simo-Kalioso Telp.0271-701008

Nomor : 070/ 82 /6.13/2023
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Nogosari, 9 Mei 2023

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Kelembagaan Universitas Islam
Negeri dan Raden Mas Said
Surakarta
Di -

SUKOHARJO

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor : B-1186/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/05/2023 tanggal 04 Mei 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian, Kepada Mahasiswa :

Nama : ARIZKA DWI NUGRAHENI
NIM : 185221061
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi, Transparansi dan Pemahaman Peraturan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus seluruh Desa di Kecamatan Nogosari)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas, kami izinkan untuk melakukan Penelitian di desa – desa pada Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali terhitung mulai tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



LAMPIRAN. 3 KUISIONER PENELITIAN KUISIONER

Saya Arizka Dwi Nugraheni mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Raden Mas Said Surakarta. Dalam rangka penyelesaian skripsi yang sedang saya laksanakan dengan judul “Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari)”. Saya bermaksud meminta bantuan Bapak/Ibu dan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.

Adapun satu dari berbagai langkah guna memperoleh data adalah menyebar kuesioner pada responden. Sehingga saya berharap adanya kesediaan Ibu/Bapak dan Saudara/i dapat mengisikan kuesioner ini guna dijadikan data yang dapat dipergunakan pada penelitian. Segala informasi yang diberikan terkait data ini dapat dijamin keamanannya. Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk pengisian kuesioner

1. Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada identitas responden.
2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan tanda centang (√) pada kolom yang anda anggap paling tepat di kolom yang telah di sediakan.
3. Responden diharapkan untuk tidak menjawab lebih dari satu pilihan jawaban.

BAGIAN I

IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk : Dimohonkan Ibu/Bapak/Saudara/Saudari bersedia melengkapi identitas dengan jelas dan penuh dengan memberikan melingkari (√) terhadap kolom tersedia berdasarkan pada keterangan yang terdapat di masing-masing pertanyaan.

KUISIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Instansi	:			
Nama Responden	:		(boleh tidak diisi)	
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki	<input type="checkbox"/>	Perempuan <input type="checkbox"/>
Jabatan	:	Kepala Desa	<input type="checkbox"/>	Kaur Pemerintahan <input type="checkbox"/>
		Sekretaris Desa	<input type="checkbox"/>	BPD <input type="checkbox"/>
		Kaur Keuangan	<input type="checkbox"/>	
Usia	:	17 - 25 tahun	<input type="checkbox"/>	35-44 tahun <input type="checkbox"/>
		26 - 34 tahun	<input type="checkbox"/>	> 45 tahun <input type="checkbox"/>
Pendidikan Terakhir	:	Strata 2	<input type="checkbox"/>	Diploma (D3) <input type="checkbox"/>
		Strata 1	<input type="checkbox"/>	SMA/K <input type="checkbox"/>
		Lainnya	<input type="checkbox"/>	
Lama jabatan	:	< 1 tahun	<input type="checkbox"/>	1-2 tahun <input type="checkbox"/>
		3-5 tahun	<input type="checkbox"/>	> 5 tahun <input type="checkbox"/>
No. Hp / Telepon	:			

BAGIAN II

DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan untuk memberikan tanda thickmark (√) pada salah kolom di samping pertanyaan untuk menentukan seberapa setuju Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai hal-hal berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. KS : Kurang Setuju
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

A.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)					
No.	Pertanyaan	1 STS	2 TS	3 KS	4 S	5 SS
1.	Seluruh aktivitas pelaksanaan pemerintah desa diharuskan bisa ditanggungjawabkan pada rakyat desa berdasarkan pada ketetapan yang diberlakukan.					
2.	Untuk menyampaikan laporan finansial desa dijalankan dengan tepat waktu dan keseluruhan.					
3.	Terdapat laporan penyerapan dana desa dari tahap 1 sampai tahap 2 di desa anda yang mengalami keterlambatan					
4.	Anggaran desa diajukan dengan berkas penyusunan rencana dan dijadikan landasan pembuatan susunan APBDesa.					
5.	Untuk tahapan pembuatan rencana serta anggaran, pemerintahan desa					

	diharuskan mengikutsertakan BPD, jadi program kerja serta aktivitas yang dibuat berdasarkan pada keperluan dan kebutuhan rakyat desa.					
6.	Laporan keuangan desa diperiksa oleh Inspektorat guna melakukan analisis laporan keuangan untuk dapat Mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan anggaran					
7.	Pemerintahan laporan keuangan desa dilakukan Inspektorat guna menjalankan analisa laporan yang bisa melihat kesuksesan penyelenggaraan anggaran.					

Sumber : Hartikayanti & Jayanti, (2020) yang dikembangkan oleh peneliti.

B.		Kompetensi (X1)				
No.	Pertanyaan	1 STS	2 TS	3 KS	4 S	5 SS
1.	Perangkat desa telah mengerti peran, fungsi dan tata cara pegelolaan dana desa.					
2.	Perangkat desa telah benar-benar memahami semua regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.					
3.	Pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan berguna untuk mengembangkan kemampuan aparatur desa					

4.	Perangkat desa senantiasa bertugas dengan berpusat terhadap sikap dan nilai norma sebagai pegawai					
5.	perangkat desa memiliki pengalaman yang memadahi untuk menjalankan tugas di bidang pengelolaan dana desa.					
6.	Apabila ada masalah yang timbul selama proses pengelolaan dana desa berjalan, saya sebagai perangkat desa akan berusaha mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut					
7.	Wawasan terhadap teknologi informasi mendorong kapasitas untuk bekerja					

Sumber : Hartikayanti & Jayanti, (2020) yang dikembangkan oleh peneliti.

C.		Transparansi (X2)				
No.	Pertanyaan	1 STS	2 TS	3 KS	4 S	5 SS
1.	Terdapat musyawarah rencana penggunaan alokasi dana desa antara perangkat desa dengan masyarakat.					
2.	Adanya akses untuk masyarakat terhadap informasi mengenai rencana penggunaan alokasi dana desa					
3.	Pemerintahan desa sesuai					

	waktunya memberikan laporan tanggung jawab finansial desa					
4.	Adanya informasi yang mengenai laporan berkala penggunaan alokasi dana desa.					
5.	Masyarakat berpartisipasi untuk penyelenggaraan pengalokasian dana desa.					
6.	Apakah masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbangdes					
7.	Adanya keterbukaan mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan alokasi dana desa					

Sumber : Hartikayanti & Jayanti, (2020) yang dikembangkan oleh peneliti.

D. Pemahaman Peraturan Keuangan (X3)						
No.	Pertanyaan	1 STS	2 TS	3 KS	4 S	5 SS
1.	Perangkat Desa di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Nogosari paham akan Peraturan keuangan desa					
2.	Perangkat Desa paham akan PERMENDAGRINo.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa					
3.	Saya sebagai aparatur desa paham keselarasan perencanaan tingkat partisipasi RKP desa					
4.	Saya Perangkat Desa yang paham Mengenai laporan Pertanggungjawaban dana desa					

5.	Apakah Raperdes APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk pembahasan lebih lanjut					
----	---	--	--	--	--	--

Sumber : Hartikayanti & Jayanti, (2020) yang dikembangkan oleh peneliti.

LAMPIRAN. 4 HASIL WAWANCARA

Transkrip Wawancara

Informan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Banyudono
Nama : Budi Arif
Tempat : Kantor Kecamatan Banyudono
Waktu : Senin, 19 September 2022 (13.00-selesai)
Catatan : Pewawancara (A) dan Informan (B)

A : assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu bapak dalam bekerja, perkenalkan saya arizka mahasiswa Febi UIN Raden Mas Said Surakarta, maksud kedatangan saya kemari untuk izin melakukan observasi terkait skripsi yang saya tulis, berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan banyudono pak

B : baik mbak silahkan...

A : apakah pemerintah desa di kecamatan banyudono ini sudah menjalankan pengelolaan dana desa dengan peraturan yang sesuai dan yang berlaku ?

B : insyaallah sudah

A : Kalau boleh tahu pak, tahapan apa saja kah dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa?

B : Ada 5 tahapan mba, ada tahapan perencanaan yang dilakukan oleh bendahara desa atau kaur keuangan, tahapan pelaksanaan juga dilakukan oleh bendahara dan kaur keuangan, tahapan penatausahaan, tahapan pelaporan yang dilakukan kepala desa, dan laporan pertanggungjawaban dr desa kepada kabupaten.

A : Dari tahapan perencanaan tersebut apakah seperti apakah tahapan tersebut di desa se-kecamatan banyudono?

B : tahapan perencanaan ini dimulai dengan muswarah desa yang sering disebut musrenbangdes dalam proses muswarah tersebut kita akan mendapat masukan dari warga istilahnya pendapat untuk kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

A : siapa yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut pak ?

B : seperti BPD, perwakilan RT masing-masing 5 orang biasanya dan Rw, serta tokoh masyarakat.

A : kalau boleh tahu pak, kapan pelaksanaan musrenbangdes tersebut ?

B : Musrenbangdes biasanya dilaksanakan pada bulan januari sampai dengan februari, musrenbangdes yang dikondisikan oleh pemerintahan kecamatan untuk dapat menetapkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

A : Kalau untuk perumusan RPJMdes dan RKPdes apakah ada keterlibatan warga dalam penyusunan hal tersebut?

B : RKPdes dilihat dari musyawarah desa, mereka merencanakan apa, nahsatu tahun berikutnya kita jadikan landasan RKPdes tahun selanjutnya, dan RPJMdes tidak ada keikutsertaan warga dalam penyusunannya, penyusunan ini anya terbatas dilakukan oleh pemilihan tim penyusunan RPJMdes dipilih oleh desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Masing-masing.

A : setelah adanya perencanaan maka dilakukan pelaksanaan pengelolaan dana desa, alur dari kegiatan tersebut seperti apa nggih pak?

B : ya, perencanaan dana desa ini turun tidak hanya sekali namun ada 3 tahap, ditahap pertama kita susunkan dengan anggaran yang ada, kita dahulukan sesuai dengan ini, kita melihat kesiapan untuk ini sesuai kepentingannya itu utuk apa kalau fisik ya kita komunikasikan dengan wilayah yang mendapatkan anggaran untuk itu.

A : bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat itu seperti apa pak?

B : bentuk laporan agar dapat di lihat masyarakat luas biasanya berbentuk seperti baliho besar yang di tempelkan di papan informasi di masing-masing desa. Pertanggungjawaban ke masyarakat yaitu dana itu sudah di salurkan dan ditetakan untuk kegiatan.

A : apakah terdapat hambatan atau kendala dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pak ?

B : adadesa yang masih tertinggal dalam proses penyerapan dana desa. Target penyerapan dana desa melampaui batas sehingga berdampak pada penyerapan dana desa selanjutnya ikut mengalami keterlambatan.

LAMPIRAN. 5 HASIL UJI DESKRIPSI VARIABEL

1. Hasil Uji Deskripsi Variabel Kompetensi

		Statistics						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
N	Valid	115	115	115	115	115	115	115
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.33	4.22	3.97	4.19	4.27	4.30	4.28
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.603	.659	.783	.687	.667	.675	.720
Variance		.364	.435	.613	.472	.444	.456	.518
Range		2	2	3	3	2	2	2
Minimum		3	3	2	2	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5	5

2. Hasil Uji Deskripsi Variabel Transparansi

		Statistics						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
N	Valid	115	115	115	115	115	115	115
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.30	4.24	4.18	4.24	4.27	4.26	3.85
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.675	.615	.696	.683	.692	.636	.740
Variance		.456	.379	.484	.467	.479	.405	.548
Range		2	2	2	3	3	2	3
Minimum		3	3	3	2	2	3	2
Maximum		5	5	5	5	5	5	5

3. Hasil Uji Deskripsi Variabel Pemahaman Peraturan Keuangan

		Statistics				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
N	Valid	115	115	115	115	115
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.22	4.14	4.08	4.12	4.07
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.711	.712	.715	.703	.792
Variance		.505	.507	.511	.494	.627
Range		2	2	2	2	3
Minimum		3	3	3	3	2
Maximum		5	5	5	5	5

4. Hasil Uji Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

		Statistics						
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
N	Valid	115	115	115	115	115	115	115
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.37	4.38	3.75	4.40	4.41	4.26	4.29
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Std. Deviation		.694	.643	1.050	.632	.647	.663	.659
Variance		.482	.414	1.103	.400	.419	.440	.434
Range		2	2	4	2	2	2	2
Minimum		3	3	1	3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5	5

LAMPIRAN. 6 HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

1. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi

		Correlations							TOTAL
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	_X1
X1.1	Pearson	1	.546**	.322**	.418**	.628**	.534**	.393**	.718**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		115	115	115	115	115	115	115	115

X1.2	Pearson Correlation	.546**	1	.440**	.585**	.584**	.485**	.407**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X1.3	Pearson Correlation	.322**	.440**	1	.420**	.253**	.285**	.235*	.579**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.006	.002	.011	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X1.4	Pearson Correlation	.418**	.585**	.420**	1	.499**	.577**	.530**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X1.5	Pearson Correlation	.628**	.584**	.253**	.499**	1	.640**	.592**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.006	.000		.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X1.6	Pearson Correlation	.534**	.485**	.285**	.577**	.640**	1	.605**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.000		.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X1.7	Pearson Correlation	.393**	.407**	.235*	.530**	.592**	.605**	1	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.011	.000	.000	.000		.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
TOTAL _X1	Pearson Correlation	.718**	.769**	.579**	.773**	.795**	.786**	.723**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	115	115	115	115	115	115	115	115

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi

		Correlations							TOTAL_
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2
X2.1	Pearson	1	.585**	.500**	.527**	.447**	.472**	.281**	.726**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X2.2	Pearson	.585**	1	.469**	.505**	.421**	.374**	.253**	.679**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.006	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X2.3	Pearson	.500**	.469**	1	.552**	.571**	.625**	.308**	.771**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X2.4	Pearson	.527**	.505**	.552**	1	.621**	.559**	.523**	.823**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X2.5	Pearson	.447**	.421**	.571**	.621**	1	.635**	.455**	.798**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X2.6	Pearson	.472**	.374**	.625**	.559**	.635**	1	.436**	.783**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
X2.7	Pearson	.281**	.253**	.308**	.523**	.455**	.436**	1	.638**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.002	.006	.001	.000	.000	.000		.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
TOTAL_ X2	Pearson	.726**	.679**	.771**	.823**	.798**	.783**	.638**	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	115	115	115	115	115	115	115	115

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Keuangan

		Correlations					TOTAL_X
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	3
X3.1	Pearson	1	.685**	.536**	.386**	.409**	.774**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
X3.2	Pearson	.685**	1	.582**	.439**	.465**	.815**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
X3.3	Pearson	.536**	.582**	1	.539**	.378**	.778**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
X3.4	Pearson	.386**	.439**	.539**	1	.584**	.760**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
X3.5	Pearson	.409**	.465**	.378**	.584**	1	.745**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	115	115	115	115	115	115
TOTAL_X 3	Pearson	.774**	.815**	.778**	.760**	.745**	1
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	115	115	115	115	115	115

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

		Correlations							TOTAL
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.600**	.179	.436**	.340**	.377**	.396**	.688**
	Sig. (2-tailed)		.000	.056	.000	.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
Y.2	Pearson Correlation	.600**	1	.196*	.505**	.464**	.525**	.380**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000		.036	.000	.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
Y.3	Pearson Correlation	.179	.196*	1	.404**	.088	.083	.207*	.545**
	Sig. (2-tailed)	.056	.036		.000	.347	.380	.027	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
Y.4	Pearson Correlation	.436**	.505**	.404**	1	.668**	.397**	.290**	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.002	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
Y.5	Pearson Correlation	.340**	.464**	.088	.668**	1	.526**	.298**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.347	.000		.000	.001	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
Y.6	Pearson Correlation	.377**	.525**	.083	.397**	.526**	1	.389**	.664**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.380	.000	.000		.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
Y.7	Pearson Correlation	.396**	.380**	.207*	.290**	.298**	.389**	1	.614**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.027	.002	.001	.000		.000
	N	115	115	115	115	115	115	115	115
TOTAL _Y	Pearson Correlation	.688**	.751**	.545**	.777**	.678**	.664**	.614**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	115	115	115	115	115	115	115	115

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.856	7

6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.865	7

7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.832	5

8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.773	7

LAMPIRAN. 7 HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.11973209
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.065
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.090 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardize d Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2.960	1.230		2.406	.018
	Kompetensi	-.032	.060	-.079	-.535	.594
	Transparansi	-.033	.067	-.081	-.496	.621
	Pemahaman	.026	.065	.052	.400	.690
	Peraturan Keuangan					

a. Dependent Variable: RES2

3. Uji Multikolenieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.375	1.864		3.420	.001		
	Kompetensi	.264	.090	.277	2.925	.004	.408	2.452
	Transparansi	.394	.102	.406	3.865	.000	.331	3.018
	Pemahaman Peraturan Keuangan	.202	.099	.172	2.055	.042	.524	1.907

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

LAMPIRAN. 8 HASIL UJI KETEPATAN MODEL

1. Uji Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771 ^a	.594	.583	2.148

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Keuangan, Kompetensi , Transparansi

2. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	749.211	3	249.737	54.118	.000 ^b
	Residual	512.232	111	4.615		
	Total	1261.443	114			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Keuangan, Kompetensi , Transparansi

LAMPIRAN. 9 HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA

1. Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.375	1.864		3.420	.001
	Kompetensi	.264	.090	.277	2.925	.004
	Transparansi	.394	.102	.406	3.865	.000
	Pemahaman Peraturan Keuangan	.202	.099	.172	2.055	.042

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

LAMPIRAN. 10 HASIL UJI T

1. Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.375	1.864		3.420	.001
	Kompetensi	.264	.090	.277	2.925	.004
	Transparansi	.394	.102	.406	3.865	.000
	Pemahaman Peraturan Keuangan	.202	.099	.172	2.055	.042

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

LAMPIRAN. 11 TABEL R

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
101	0.1630	0.1937	0.2290	0.2528	0.3196
102	0.1622	0.1927	0.2279	0.2515	0.3181
103	0.1614	0.1918	0.2268	0.2504	0.3166
104	0.1606	0.1909	0.2257	0.2492	0.3152
105	0.1599	0.1900	0.2247	0.2480	0.3137
106	0.1591	0.1891	0.2236	0.2469	0.3123
107	0.1584	0.1882	0.2226	0.2458	0.3109
108	0.1576	0.1874	0.2216	0.2446	0.3095
109	0.1569	0.1865	0.2206	0.2436	0.3082
110	0.1562	0.1857	0.2196	0.2425	0.3068
111	0.1555	0.1848	0.2186	0.2414	0.3055
112	0.1548	0.1840	0.2177	0.2403	0.3042
113	0.1541	0.1832	0.2167	0.2393	0.3029
114	0.1535	0.1824	0.2158	0.2383	0.3016
115	0.1528	0.1816	0.2149	0.2373	0.3004
116	0.1522	0.1809	0.2139	0.2363	0.2991
117	0.1515	0.1801	0.2131	0.2353	0.2979
118	0.1509	0.1793	0.2122	0.2343	0.2967
119	0.1502	0.1786	0.2113	0.2333	0.2955
120	0.1496	0.1779	0.2104	0.2324	0.2943

LAMPIRAN. 13 TABULASI DATA PENELITIAN (KARAKTERISTIK RESPONDEN)

No.	Nama Desa	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan	Usia	Lama Bekerja
1	Bendan	Laki-Laki	Kaur Keuangan	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
2	Bendan	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun
3	Bendan	Laki-Laki	Sekertaris Desa	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
4	Bendan	Laki-Laki	BPD	S1	> 44 Tahun	3-5 Tahun
5	Ngaru-Aru	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun
6	Ngaru-Aru	Laki-Laki	BPD	SMA/K	35-43 Tahun	> 5 Tahun
7	Ngaru-Aru	Laki-Laki	Sekertaris Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun
8	Ngaru-Aru	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	S1	35-43 Tahun	> 5 Tahun
9	Ngaru-Aru	Perempuan	Kaur Keuangan	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
10	Dukuh	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
11	Dukuh	Laki-Laki	Sekertaris Desa	SMA/K	35-43 Tahun	> 5 Tahun
12	Dukuh	Laki-Laki	BPD	S1	> 44 Tahun	3-5 Tahun
13	Dukuh	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	35-43 Tahun	> 5 Tahun
14	Jipangan	Laki-Laki	BPD	SMA/K	35-43 Tahun	> 5 Tahun
15	Jipangan	Laki-Laki	Sekertaris Desa	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
16	Jipangan	Laki-Laki	Kaur Keuangan	S1	26-34 Tahun	3-5 Tahun
17	Jipangan	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	> 5 Tahun
18	Jipangan	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
19	Jembungan	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	> 44 Tahun	3-5 Tahun

20	Jembungan	Laki-Laki	Sekertaris Desa	SMA/K	26-34 Tahun	3-5 Tahun
21	Jembungan	Laki-Laki	BPD	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
22	Jembungan	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	S1	26-34 Tahun	3-5 Tahun
23	Sambon	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	26-34 Tahun	1-2 Tahun
24	Sambon	Perempuan	Kaur Keuangan	S1	26-34 Tahun	3-5 Tahun
25	Sambon	Laki-Laki	Sekertaris Desa	SMA/K	26-34 Tahun	3-5 Tahun
26	Sambon	Laki-Laki	BPD	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
27	Cangkringan	Perempuan	Kepala Desa	S1	26-34 Tahun	1-2 Tahun
28	Cangkringan	Laki-Laki	Kaur Keuangan	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
29	Cangkringan	Laki-Laki	Sekertaris Desa	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
30	Cangkringan	Laki-Laki	BPD	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
31	Cangkringan	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
32	Ketaon	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	> 5 Tahun
33	Ketaon	Perempuan	Kaur Keuangan	SMA/K	35-43 Tahun	> 5 Tahun
34	Ketaon	Laki-Laki	Sekertaris Desa	S1	35-43 Tahun	> 5 Tahun
35	Ketaon	Laki-Laki	BPD	SMA/K	26-34 Tahun	> 5 Tahun
36	Ketaon	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	26-34 Tahun	> 5 Tahun
37	Tanjungsari	Laki-Laki	Sekertaris Desa	SMA/K	35-43 Tahun	> 5 Tahun
38	Tanjungsari	Perempuan	Kaur Keuangan	SMA/K	35-43 Tahun	> 5 Tahun
39	Tanjungsari	Perempuan	Kaur Pemerintahan	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
40	Tanjungsari	Laki-Laki	Kepala Desa	Diploma 3	35-43 Tahun	3-5 Tahun
41	Trayu	Perempuan	Sekertaris Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun

42	Trayu	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun
43	Trayu	Laki-Laki	Kaur Keuangan	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
44	Trayu	Laki-Laki	BPD	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
45	Bangak	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun
46	Bangak	Laki-Laki	Sekertaris Desa	SMA/K	26-34 Tahun	3-5 Tahun
47	Bangak	Perempuan	Kaur Keuangan	Diploma 3	35-43 Tahun	1-2 Tahun
48	Bangak	Laki-Laki	BPD	S1	> 44 Tahun	3-5 Tahun
49	Bangak	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	26-34 Tahun	1-2 Tahun
50	Batan	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
51	Batan	Laki-Laki	Kaur Keuangan	SMA/K	26-34 Tahun	3-5 Tahun
52	Batan	Laki-Laki	Kepala Desa	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
53	Batan	Laki-Laki	BPD	S1	35-43 Tahun	> 5 Tahun
54	Batan	Laki-Laki	Sekertaris Desa	S1	26-34 Tahun	3-5 Tahun
55	Banyudono	Laki-Laki	Kepala Desa	SMA/K	> 44 Tahun	1-2 Tahun
56	Banyudono	Laki-Laki	Kaur Keuangan	S1	26-34 Tahun	3-5 Tahun
57	Banyudono	Laki-Laki	BPD	S1	26-34 Tahun	3-5 Tahun
58	Banyudono	Laki-Laki	Sekertaris Desa	S1	35-43 Tahun	> 5 Tahun
59	Banyudono	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
60	Denggungan	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
61	Denggungan	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
62	Denggungan	Laki-Laki	BPD	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
63	Denggungan	Laki-Laki	Sekertaris Desa	Diploma 3	> 44 Tahun	3-5 Tahun

64	Denggungan	Laki-Laki	Kaur Keuangan	S1	17-25 Tahun	3-5 Tahun
65	Kenteng	Laki-Laki	Kepala Desa	Diploma 3	> 44 Tahun	> 5 Tahun
66	Kenteng	Perempuan	Sekretaris Desa	Diploma 3	> 44 Tahun	3-5 Tahun
67	Kenteng	Laki-Laki	BPD	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
68	Kenteng	Perempuan	Kaur Pemerintahan	S1	26-34 Tahun	> 5 Tahun
69	Potronayan	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	> 44 Tahun	3-5 Tahun
70	Potronayan	Laki-Laki	Sekretaris Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun
71	Potronayan	Laki-Laki	BPD	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
72	Potronayan	Laki-Laki	Kaur Keuangan	S1	26-34 Tahun	3-5 Tahun
73	Potronayan	Perempuan	Kaur Pemerintahan	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
74	Sembungan	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun
75	Sembungan	Perempuan	Sekretaris Desa	S1	35-43 Tahun	1-2 Tahun
76	Sembungan	Laki-Laki	Kaur Keuangan	S1	26-34 Tahun	3-5 Tahun
77	Sembungan	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
78	Jeron	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	1-2 Tahun
79	Jeron	Laki-Laki	Sekretaris Desa	Diploma 3	> 44 Tahun	> 5 Tahun
80	Jeron	Laki-Laki	BPD	SMA/K	35-43 Tahun	> 5 Tahun
81	Jeron	Perempuan	Kaur Keuangan	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
82	Ketitang	Laki-Laki	Kepala Desa	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
83	Ketitang	Laki-Laki	Sekretaris Desa	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
84	Ketitang	Laki-Laki	BPD	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
85	Rembun	Laki-Laki	Kepala Desa	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun

86	Rembun	Laki-Laki	Sekertaris Desa	Diploma 3	26-34 Tahun	1-2 Tahun
87	Rembun	Laki-Laki	BPD	S1	35-43 Tahun	> 5 Tahun
88	Rembun	Laki-Laki	Kaur Keuangan	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
89	Rembun	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
90	Guli	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
91	Guli	Perempuan	Sekertaris Desa	Diploma 3	> 44 Tahun	> 5 Tahun
92	Guli	Laki-Laki	BPD	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
93	Guli	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	Diploma 3	35-43 Tahun	3-5 Tahun
94	Tegal Giri	Laki-Laki	Kepala Desa	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
95	Tegal Giri	Perempuan	Sekertaris Desa	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
96	Tegal Giri	Laki-Laki	BPD	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
97	Tegal Giri	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	S1	> 44 Tahun	3-5 Tahun
98	Bendo	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
99	Bendo	Perempuan	Sekertaris Desa	Diploma 3	26-34 Tahun	1-2 Tahun
100	Bendo	Laki-Laki	BPD	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
101	Keyongan	Laki-Laki	Kepala Desa	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
102	Keyongan	Laki-Laki	Sekertaris Desa	S1	26-34 Tahun	1-2 Tahun
103	Keyongan	Laki-Laki	Kaur Keuangan	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
104	Pojok	Laki-Laki	Kepala Desa	S1	35-43 Tahun	3-5 Tahun
105	Pojok	Laki-Laki	Sekertaris Desa	Diploma 3	> 44 Tahun	> 5 Tahun
106	Pojok	Laki-Laki	BPD	S1	> 44 Tahun	> 5 Tahun
107	Pojok	Perempuan	Kaur Keuangan	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun

108	Pojok	Laki-Laki	Kaur Pemerintahan	Diploma 3	> 44 Tahun	> 5 Tahun
109	Glonggong	Laki-Laki	Kepala Desa	SMA/K	> 44 Tahun	3-5 Tahun
110	Glonggong	Laki-Laki	Sekretaris Desa	SMA/K	26-34 Tahun	1-2 Tahun
111	Glonggong	Laki-Laki	BPD	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
112	Glonggong	Perempuan	Kaur Pemerintahan	SMA/K	26-34 Tahun	1-2 Tahun
113	Pulutan	Perempuan	Kepala Desa	SMA/K	> 44 Tahun	> 5 Tahun
114	Pulutan	Laki-Laki	Sekretaris Desa	SMA/K	35-43 Tahun	3-5 Tahun
115	Pulutan	Perempuan	Kaur Keuangan	SMA/K	17-25 Tahun	1-2 Tahun

LAMPIRAN. 14 HASIL DARI JAWABAN RESPONDEN

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

NO.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Total Y
1	4	5	4	4	5	4	4	30
2	5	5	4	5	5	5	5	34
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	3	4	2	4	5	4	4	26
5	4	4	3	3	4	5	5	28
6	5	5	4	5	5	5	5	34
7	5	4	3	4	5	4	4	29
8	3	4	3	4	5	4	4	27
9	3	4	3	4	4	3	4	25
10	5	4	5	5	5	4	4	32
11	4	5	2	4	4	5	4	28
12	4	3	3	4	4	4	4	26
13	4	4	4	5	5	4	3	29
14	4	5	2	4	4	5	4	28
15	5	5	4	5	5	5	5	34
16	5	5	5	5	5	5	5	35
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	3	3	3	3	3	3	3	21

20	3	3	3	3	3	3	3	21
21	5	5	5	4	4	4	4	31
22	5	5	5	5	5	4	4	33
23	4	4	3	4	4	3	4	26
24	5	5	5	5	5	5	3	33
25	4	5	5	5	5	4	5	33
26	5	5	3	4	4	4	3	28
27	5	5	3	5	5	5	5	33
28	4	4	2	3	4	4	4	25
29	5	4	2	4	4	3	3	25
30	5	5	5	5	4	5	5	34
31	5	5	3	5	5	4	4	31
32	5	4	2	4	5	5	5	30
33	5	5	1	5	5	5	4	30
34	5	4	4	4	4	4	5	30
35	4	5	2	4	4	4	4	27
36	4	5	2	5	5	5	5	31
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	4	4	3	4	5	4	4	28
39	3	3	3	3	3	3	3	21
40	4	5	2	5	5	5	4	30
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	5	5	5	5	5	5	5	35
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	5	5	3	5	5	5	5	33
45	5	5	3	5	5	4	4	31
46	4	4	4	4	4	4	4	28
47	4	4	3	4	4	4	4	27
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	4	4	3	4	4	4	4	27
50	5	5	1	3	5	5	5	29
51	5	5	1	5	5	5	5	31
52	5	4	2	4	4	4	4	27
53	5	5	3	4	4	4	4	29
54	4	4	3	4	4	4	5	28
55	4	4	3	4	4	4	4	27
56	4	3	2	5	5	4	4	27
57	5	5	3	5	5	5	5	33
58	5	4	3	4	5	4	5	30

59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	4	4	4	4	4	4	5	29
61	5	5	3	5	5	5	4	32
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	5	5	5	5	5	5	35
64	5	5	4	5	5	5	5	34
65	4	4	5	5	5	5	5	33
66	4	4	3	5	5	4	3	28
67	5	4	4	4	4	4	5	30
68	5	5	5	5	5	5	4	34
69	5	5	5	5	5	5	5	35
70	4	4	3	3	4	4	4	26
71	4	4	4	4	4	3	5	28
72	5	5	5	5	5	4	5	34
73	5	4	4	4	4	4	4	29
74	4	4	3	4	4	4	4	27
75	4	3	3	4	3	4	4	25
76	5	5	3	5	5	5	4	32
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	5	4	5	5	3	3	3	28
80	4	5	5	3	3	5	5	30
81	4	3	4	4	4	4	4	27
82	3	4	4	4	4	4	4	27
83	4	4	4	4	4	4	4	28
84	5	4	5	5	4	3	5	31
85	3	3	4	5	5	4	5	29
86	5	5	5	5	4	3	4	31
87	5	5	5	5	5	5	3	33
88	3	4	4	5	5	4	4	29
89	5	5	4	5	5	3	5	32
90	4	4	4	5	3	5	4	29
91	3	5	5	5	4	3	4	29
92	5	5	5	5	5	5	5	35
93	5	5	4	5	5	5	5	34
94	3	5	5	5	5	5	5	33
95	4	4	4	4	4	4	4	28
96	4	4	3	4	4	4	4	27
97	4	4	4	4	4	4	4	28

98	5	5	4	5	5	4	5	33
99	4	4	4	4	5	5	3	29
100	5	5	5	5	5	5	5	35
101	5	4	5	5	4	4	5	32
102	4	5	5	5	5	5	3	32
103	5	4	5	5	5	5	5	34
104	5	5	4	4	4	5	4	31
105	4	4	4	5	5	4	4	30
106	5	5	4	4	3	5	5	31
107	5	4	4	4	4	4	5	30
108	4	4	4	5	5	5	4	31
109	3	4	4	4	4	4	4	27
110	5	5	5	5	5	4	4	33
111	5	5	4	4	4	4	5	31
112	5	5	5	5	5	5	5	35
113	5	5	4	4	3	3	5	29
114	3	3	5	4	4	4	4	27
115	3	3	3	3	3	3	3	21

2. Kompetensi (X1)

No.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	Total X1
1	5	4	4	4	4	4	3	28
2	4	4	4	4	4	4	3	27
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	3	4	3	3	3	24
5	4	4	5	4	5	4	4	30
6	5	4	5	4	5	4	4	31
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	5	3	4	3	3	4	3	25
9	5	5	5	4	5	5	4	33
10	4	4	5	4	4	5	4	30
11	4	3	4	4	3	4	5	27
12	3	3	4	4	3	4	4	25
13	4	4	5	5	3	5	4	30
14	5	5	5	5	5	5	4	34
15	5	5	4	5	5	5	5	34
16	5	5	5	5	5	5	5	35
17	5	5	5	5	5	5	5	35

18	4	4	3	4	5	4	4	28
19	3	3	3	3	3	3	3	21
20	4	3	3	2	3	3	3	21
21	3	4	4	5	4	4	4	28
22	4	4	4	5	4	4	3	28
23	4	4	4	4	4	3	3	26
24	5	5	5	4	5	4	5	33
25	5	5	5	5	5	5	4	34
26	4	3	4	3	3	3	3	23
27	5	4	5	5	4	5	5	33
28	5	5	5	5	5	5	4	34
29	4	4	3	4	3	4	3	25
30	4	3	3	3	3	3	3	22
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	5	5	5	5	5	5	4	34
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	5	4	5	4	4	4	4	30
35	4	4	3	3	4	4	3	25
36	3	4	4	5	4	4	4	28
37	4	5	4	4	4	4	3	28
38	4	5	4	4	4	3	4	28
39	3	3	3	3	3	3	3	21
40	4	5	4	4	5	4	4	30
41	5	5	4	4	5	5	4	32
42	5	5	5	5	5	5	5	35
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	5	4	4	4	5	5	5	32
45	4	4	4	4	4	5	4	29
46	4	4	4	4	4	4	3	27
47	5	4	5	4	4	4	4	30
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	3	4	5	4	4	3	5	28
50	5	4	4	4	5	5	4	31
51	4	5	4	5	4	5	5	32
52	5	4	5	4	5	5	5	33
53	4	4	4	4	4	3	4	27
54	4	5	4	4	4	4	4	29
55	4	5	4	5	4	5	5	32
56	5	5	5	4	4	4	5	32

57	5	5	5	5	4	4	5	33
58	3	4	4	5	3	4	4	27
59	4	4	4	3	4	4	4	27
60	4	4	4	4	4	4	4	28
61	4	4	4	3	4	5	4	28
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	5	5	5	5	5	5	35
64	4	4	5	5	4	4	5	31
65	4	4	4	5	4	4	5	30
66	4	4	4	4	4	4	4	28
67	4	5	3	4	4	4	4	28
68	4	4	4	4	4	3	4	27
69	5	5	5	5	5	5	5	35
70	4	3	3	3	3	3	3	22
71	5	5	4	4	4	4	4	30
72	4	4	4	4	5	5	5	31
73	4	4	4	4	4	4	4	28
74	4	4	3	3	4	4	3	25
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	5	5	3	5	4	4	4	30
77	4	4	4	3	4	4	4	27
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	4	4	4	4	4	5	5	30
80	5	5	3	5	5	5	5	33
81	4	3	3	3	5	4	5	27
82	4	4	3	4	4	5	5	29
83	4	4	4	4	4	4	4	28
84	4	4	3	5	5	5	5	31
85	4	4	3	4	5	5	4	29
86	4	4	4	4	4	4	5	29
87	5	5	3	5	5	5	5	33
88	4	3	3	4	4	4	4	26
89	5	3	3	5	5	5	5	31
90	4	5	3	3	5	4	5	29
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	5	5	5	5	5	5	5	35
93	4	5	4	4	4	5	5	31
94	4	4	4	4	4	5	5	30
95	5	4	3	4	4	4	4	28

96	4	4	3	4	4	4	4	27
97	4	4	3	4	4	4	5	28
98	5	4	4	5	5	5	5	33
99	4	3	2	4	5	5	5	28
100	5	5	5	5	5	5	5	35
101	5	5	3	4	5	5	5	32
102	5	4	3	4	5	3	5	29
103	5	5	4	5	5	5	5	34
104	5	4	2	5	5	5	5	31
105	5	4	3	4	4	5	5	30
106	5	5	4	5	5	4	4	32
107	4	4	4	4	4	4	5	29
108	4	4	5	5	5	5	5	33
109	4	3	3	3	4	4	4	25
110	5	5	4	4	5	5	5	33
111	4	4	4	4	4	4	5	29
112	5	5	5	5	5	5	5	35
113	5	5	3	5	5	5	5	33
114	4	4	3	4	4	4	4	27
115	3	3	3	3	3	3	3	21

3. Transparansi (X2)

NO.	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	TOTAL X2
1	5	5	3	4	4	4	5	30
2	5	3	5	5	5	5	5	33
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	3	5	4	4	4	28
5	4	5	3	4	3	4	4	27
6	4	4	4	5	4	5	5	31
7	3	4	4	4	3	3	3	24
8	4	4	3	3	3	3	3	23
9	5	4	4	4	4	4	4	29
10	4	4	3	5	3	3	5	27
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	5	4	4	5	5	4	4	31
13	3	4	4	3	4	4	3	25
14	3	4	4	3	4	3	3	24
15	5	5	5	5	5	5	4	34

16	5	5	5	5	5	5	5	35
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	5	4	4	4	4	4	3	28
19	3	3	3	3	3	3	3	21
20	3	3	3	3	3	4	2	21
21	4	4	4	4	4	4	3	27
22	4	4	5	4	5	4	4	30
23	4	4	4	3	4	4	3	26
24	5	5	5	4	5	5	4	33
25	5	5	5	5	5	5	3	33
26	3	4	3	2	2	3	2	19
27	5	5	5	5	5	4	4	33
28	5	5	5	4	5	5	3	32
29	4	4	3	3	4	4	3	25
30	5	4	5	4	4	5	4	31
31	4	4	5	5	5	5	4	32
32	5	5	5	5	5	5	4	34
33	4	4	4	4	4	4	3	27
34	4	4	4	4	5	5	4	30
35	4	4	3	4	4	4	3	26
36	5	4	4	4	4	4	3	28
37	4	4	5	4	4	4	3	28
38	4	4	4	4	5	4	3	28
39	3	3	3	3	3	3	3	21
40	4	4	4	5	5	5	5	32
41	4	5	5	5	5	5	4	33
42	5	5	5	5	5	5	5	35
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	5	5	4	5	4	5	3	31
45	4	4	4	4	4	4	4	28
46	4	4	4	4	5	4	3	28
47	4	4	4	5	4	5	3	29
48	4	5	4	4	4	4	3	28
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	4	5	5	4	5	4	4	31
51	4	4	4	4	5	4	4	29
52	5	4	5	4	5	4	4	31
53	5	4	4	4	4	4	3	28
54	4	4	4	4	4	4	4	28

55	5	5	5	5	4	4	3	31
56	4	4	4	4	5	5	4	30
57	5	5	5	5	4	5	4	33
58	4	4	4	4	4	4	4	28
59	5	5	4	5	4	4	3	30
60	5	4	4	4	4	5	3	29
61	5	5	5	5	4	4	3	31
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	5	5	5	5	5	5	35
64	5	4	4	5	5	5	4	32
65	4	4	4	5	5	5	4	31
66	4	4	4	4	4	4	4	28
67	5	4	4	4	5	4	4	30
68	5	5	5	5	5	5	3	33
69	5	5	5	5	5	5	5	35
70	4	4	4	4	4	4	4	28
71	4	4	4	4	4	4	3	27
72	4	5	5	5	4	4	4	31
73	4	3	3	4	3	3	4	24
74	3	3	3	3	3	3	3	21
75	4	5	4	4	4	4	4	29
76	3	4	3	3	3	3	3	22
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	5	4	3	5	5	4	4	30
80	5	5	5	4	5	5	3	32
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	3	3	4	4	5	5	4	28
83	5	5	3	4	5	3	4	29
84	5	4	4	4	4	5	5	31
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	5	5	5	4	4	4	4	31
87	5	4	4	4	5	4	4	30
88	4	4	4	4	4	4	3	27
89	4	4	4	4	4	5	4	29
90	3	3	5	4	4	5	5	29
91	5	3	5	3	3	5	3	27
92	5	5	5	5	5	5	4	34
93	5	5	4	4	4	5	5	32

94	5	5	5	5	4	4	3	31
95	4	4	4	4	4	4	4	28
96	4	4	3	4	4	4	4	27
97	5	5	4	4	3	4	4	29
98	3	4	4	5	5	4	4	29
99	3	4	5	5	5	5	5	32
100	5	5	5	5	5	5	5	35
101	4	4	4	4	5	5	4	30
102	4	4	4	4	4	4	5	29
103	4	4	4	4	4	4	4	28
104	4	4	4	5	5	4	4	30
105	4	4	4	5	4	4	4	29
106	5	5	5	5	5	5	4	34
107	4	4	5	4	4	4	4	29
108	5	3	5	5	4	4	4	30
109	4	4	3	3	4	4	4	26
110	5	5	5	5	5	4	5	34
111	4	4	4	4	4	4	4	28
112	5	5	5	5	5	5	5	35
113	4	5	4	5	5	5	5	33
114	4	4	4	4	4	4	4	28
115	3	3	3	3	3	3	3	21

4. Pemahaman Peraturan Keuangan (X3)

NO.	X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL X3
1	5	5	5	4	4	23
2	5	5	3	4	4	21
3	5	5	5	5	5	25
4	3	3	3	3	3	15
5	4	5	4	4	5	22
6	4	4	4	4	3	19
7	3	3	3	5	3	17
8	4	4	4	5	5	22
9	5	4	5	5	4	23
10	4	3	4	4	3	18
11	5	5	4	3	5	22
12	5	5	5	5	3	23

13	4	4	4	5	4	21
14	3	3	3	3	3	15
15	5	5	5	4	5	24
16	5	5	5	5	5	25
17	4	4	5	4	4	21
18	4	4	4	4	4	20
19	3	3	3	3	3	15
20	3	3	3	3	3	15
21	4	5	4	5	5	23
22	5	5	5	5	5	25
23	4	5	4	5	4	22
24	4	5	5	4	4	22
25	5	5	5	5	5	25
26	3	3	3	3	2	14
27	5	5	5	4	5	24
28	5	4	5	4	4	22
29	4	4	3	4	4	19
30	5	5	5	5	5	25
31	4	4	4	4	5	21
32	5	4	4	4	5	22
33	4	4	4	4	4	20
34	3	4	3	3	5	18
35	3	3	3	3	3	15
36	4	5	4	5	4	22
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	3	3	3	3	3	15
40	5	5	4	4	5	23
41	5	5	4	4	4	22
42	5	5	5	5	5	25
43	5	5	5	5	5	25
44	5	4	4	5	4	22
45	5	5	5	4	4	23
46	3	3	3	3	3	15
47	4	4	3	3	4	18
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	5	4	3	20
50	5	3	3	4	5	20
51	4	4	4	5	5	22

52	5	5	4	5	4	23
53	4	4	4	4	5	21
54	4	4	4	4	4	20
55	4	3	4	4	4	19
56	4	4	4	4	4	20
57	4	5	5	5	5	24
58	4	4	5	4	4	21
59	4	5	5	4	4	22
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	5	5	5	5	5	25
64	5	4	4	4	5	22
65	5	4	4	4	4	21
66	4	4	3	4	4	19
67	5	3	5	5	5	23
68	4	4	4	5	4	21
69	5	5	5	5	5	25
70	3	3	3	3	3	15
71	3	4	5	5	4	21
72	4	4	5	3	3	19
73	3	3	3	4	4	17
74	4	4	4	5	5	22
75	4	4	4	3	4	19
76	3	3	4	4	4	18
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	3	4	4	4	4	19
80	4	4	4	5	5	22
81	3	3	3	3	3	15
82	4	4	4	3	3	18
83	5	5	3	3	3	19
84	4	4	4	4	4	20
85	5	4	3	4	3	19
86	4	4	4	3	4	19
87	5	4	4	4	4	21
88	4	4	4	5	4	21
89	5	5	4	4	3	21
90	5	3	5	4	3	20

91	5	5	4	4	3	21
92	5	5	5	4	4	23
93	5	5	5	5	5	25
94	4	4	4	4	5	21
95	3	3	3	4	5	18
96	4	4	3	3	3	17
97	5	4	4	4	4	21
98	5	5	4	4	4	22
99	5	5	5	4	4	23
100	5	5	5	5	5	25
101	4	4	4	4	3	19
102	4	4	4	4	4	20
103	4	5	5	5	5	24
104	5	4	4	4	5	22
105	4	3	3	4	4	18
106	4	4	3	5	5	21
107	5	4	4	3	3	19
108	4	4	4	4	4	20
109	4	4	4	3	2	17
110	3	3	5	5	3	19
111	4	4	4	4	4	20
112	5	5	5	5	5	25
113	5	5	4	5	5	24
114	4	4	4	5	5	22
115	3	3	3	3	3	15

LAMPIRAN. 15 DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN









LAMPIRAN. 16 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Arizka Dwi Nugraheni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 06 Maret 2000
Tinggi Badan : 153
Berat Badan : 63
Agama : Islam
Alamat Rumah : Ngaliyan Rt 09 Rw 02 Bendan, Banyudono,
Boyolali.
No. Telpon : 085-747-767-459
Email : arizkadwin@gmail.com
Motto : “Jika kita tidak berani mengambil resiko dalam
hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa
menciptakan masa depan.”

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2005-2006 : TK Aisiyah Bendan
2. Tahun 2006-2012 : MIN Pengging
3. Tahun 2012-2015 : SMP N 2 Banyudono
4. Tahun 2015-2018 : SMA N 1 Teras
5. Tahun 2018-2023 : UIN Raden Mas Said Surakarta

Lampiran 17 Hasil Cek Plagiasi

SKRIPSI_ARIZKA DWI NUGRAHENI_185221061

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX	23% INTERNET SOURCES	14% PUBLICATIONS	15% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.lawinsider.com Internet Source	2%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uksw.edu Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
6	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	1%
7	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
9	journal.umsu.ac.id Internet Source	<1%

57	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
58	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1%
59	Yesi Mutia Basri, Titi Desti Marianti, Rofika Rofika. "Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya", JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 2020 Publication	<1%
60	Submitted to Rutgers University, New Brunswick Student Paper	<1%
61	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
	jar.fe.ung.ac.id	
<hr/>		
62	Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude matches < 20 words
Exclude bibliography On